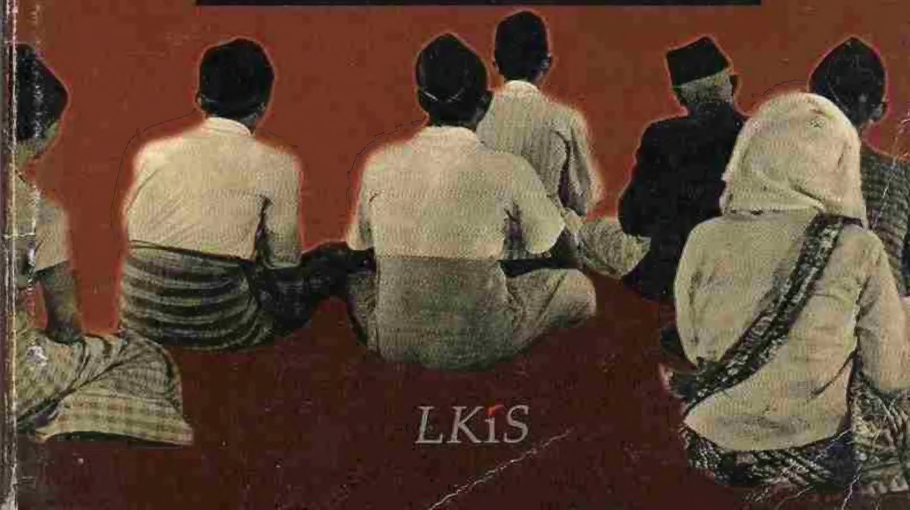


Pengantar : Mohamad Sobary

"Kiai Nyentrik"

ABDURRAHMAN WAHID

Membela Pemerintah "



LKIS

**Kiai Nyentrik
Membela Pemerintah**

LKiS

Pengantar: Mohammad Sobary

" Kiai Nyentrik

ABDURRAHMAN WAHID

Membela Pemerintah "

LKIS

KIAI NYENTRIK MEMBELA PEMERINTAH

Abdurrahman Wahid

© LKiS, 1997

xviii + 140 halaman; 12 x 18 cm

1.Kiai 2. NU. 3. Pesantren Tradisional

ISBN: 979-8966-07-4

ISBN 13: 9789798966071

Kata Pengantar: Mohammad Sobary

Editor: Tim Redaksi LKiS

Rancang Sampul: Haitami el Jaid

Setting/Layout: Santo

Penerbit dan Distribusi:

LKiS Yogyakarta

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 387194

Faks.: (0274) 379430

<http://www.lkis.co.id>

e-mail: lkis@lkis.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan I: Juli 1997

Cetakan II: September 1997

Cetakan III: Januari 2000

Cetakan IV: Januari 2010

Percetakan:

PT. LKiS Printing Cemerlang

Salakan Baru No. 3 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 417762

e-mail: lkis.printing@yahoo.com

Pesantren, *Gegeran*, *Ger-geran*

PESANTREN dan masyarakat pesantren, seolah sumur yang tak pernah kering untuk menjadi kajian ilmiah, atau sekadar gunjingan politik di ruang lobi kantor partai. Dari Geertz, Ben Anderson, dan van Bruinessen hingga Mbak Tutut dan Buya Ismail, dengan ketertarikannya masing-masing, membuat bincangan pesantren tetap menarik.

Tapi, kumpulan esai Kiai Abdurrahman Wahid ini lebih menarik dari yang pernah ditulis para skolar tersebut. Pertama, esai ini ditulis dengan sangat ilmiah. Esai-esai ini kebanyakan ditulis pada periode awal 1980-an dan diterbitkan *Tempo*. Sebuah periode yang dapat disebut sebagai “periode ilmiah”-nya Gus Dur. Yakni, ketika Gus Dur lagi gandrung dengan penggunaan metodologi ilmu sosial, terutama antropologi, untuk menjelaskan “ideologi”-nya.

Kedua, esai-esai dalam buku ini yang secara umum dapat disebut “Antropologi Kiai,” ditulis oleh “orang dalam” dalam arti sepenuhnya, yang tidak dapat tertandingi keterlibatannya oleh seorang etnolog gila sekali pun. Bau apek pesantren yang sering dicium

oleh orang luar, menjadi harum dengan analisis Gus Dur. Pola konflik, integrasi, solidaritas di masyarakat pesantren yang sering membuat pusing pengamat asing, menjadi sesuatu yang gampang dicerna. Gegeran di antara kiai lalu menjadi *ge-gean*. Benturan nilai-nilai modern dan tradisi pesantren menjadi sebuah dialektika kehidupan yang dihadapi dengan biasa-biasa saja. Namun demikian, lalu mengundang senyum, ya, senyum mafhum.

Dan selebihnya, esai-esai Gus Dur ini telah menjadi teks tersendiri, bukan?

Membaca dengan Sikap Total dan Empati

Mohammad Sobary

Di dalam bidang antropologi kita mengenal Oscar Lewis, antropolog “zaman dulu” yang memperoleh predikat *a great innovative anthropologist* dari Margaret Mead—tokoh yang lebih senior lagi—ketika *Five Families Mexican Case Studies in the Culture of Poverty* karya awal yang terbit pada 1959 itu dicetak ulang pada 1975.

Karya-karya berikutnya, *The Children of Sunzhez: Autobiography of a Mexican Family* terbit pada 1966, makin memperkokoh posisinya sebagai inovator. Lewis kemudian seolah-olah menempati dunia mitos yang dibangun para pemujanya, termasuk orang dari dunia antropologi sendiri.

Ia melakukan terobosan baru dalam penulisan etnografi. “Uraianya padat, mendalam, ‘so human’ dan ‘so revealing,’” kata Margaret Mead. Jules Henry menilai karyanya sebagai *passionate ethnography*—etnografi penuh gairah—dengan simpati mendalam terhadap para informannya yang hidup dalam ke-

pedihan. Ia tak sekadar meneliti kepentingannya sendiri; datang untuk menggali informasi penting, kemudian kabur, dan selesai di situ.

Ketiga buku inilah karya puncak Lewis yang juga kita nikmati di sini, sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh tahun kemudian. Di bidang keilmuan—khususnya ilmu sosial—kita memang selalu terlambat tiga puluh tahun dibanding Amerika. Tak mengherankan pada sekitar pertengahan 1970-an sampai pertengahan 1980-an, kita baru mulai berdebat mengenai “kebudayaan kemiskinan” yang dirumuskan Lewis. Ketika kita baru menggunakannya sebagai rujukan untuk memahami fenomena kumuh kehidupan kota kita, meskipun klaim utama Lewis atas konsep tadi sudah digoyahkan secara gigih oleh Charles A. Valentine melalui bukunya, *Culture and Poverty Critique and Counter Proposal*, terbit pada 1968.

Karya Lewis selebihnya mungkin bisa disebut “hanya” tambahan, termasuk—yang paling dahulu terbit—*Life in A Mexican Village Tepoztlan Restudied*, (1951), *Peasant Culture in India and Mexico, A Comparative Analysis* (1955), *Tepoztlan: Village in Mexico* (1960), dan *Pedro Martinez* (1964).

Dibanding pemikiran Geertz, yang meninggalkan pengaruh secara mendalam, khususnya di bidang kajian agama, politik, dan posisi kelas menengah dalam dunia bisnis kita, mungkin pengaruh Lewis pada kita lebih terbatas. Meskipun begitu, harus diakui ada dimensi khusus dalam kajian Lewis yang tak dimiliki

Geertz. Dimensi itu saya kira tampak pada kecenderungan antropologinya yang menekankan perhatian pada perkara-perkara mikro dengan pendekatan *life history* yang diwarnai kedalaman empati tersebut.

Buku-buku Lewis memberi kita kesan begitu hangat terhadap orang lain, sehangat para novelis memperlakukan tokoh-tokohnya. Kehangatan itu membuat mereka—Lewis dan para informannya yang datang dari kebudayaan yang berbeda—seolah tak terpisah oleh tirai sosial-psikologis apa pun. Pada mereka seolah tak terdapat jarak budaya yang umumnya menjadi hambatan pokok seorang peneliti dalam memahami perkara yang ditulisnya.

Saya sendiri menaruh hormat kepada Lewis. Penghormatan ini pula yang menimbulkan pengaruh penting ketika saya menulis *Between Ngayo and Nrimo: Cultural Values and Economic Behaviour Among Javanese Migrants in Tanjung Pinang* yang diterbitkan Pusat Kajian Asia Tenggara, Universitas Monash, Australia, 1986. Pilihan gaya literer dalam menulis sesuatu yang bukan sekadar cerita, diam-diam mungkin saya ambil karena pengaruh Lewis, meskipun tak boleh dilupakan bahwa saya sudah mulai menulis sastra lebih sepuluh tahun sebelum berkenalan dengan karya-karyanya.

* * *

Gus Dur, kita tahu, seorang kiai. Dalam tradisi dunia pesantren, orang menjadi kiai karena *asribel satus* Kurang-lebih itu artinya, seorang menjadi kiai

karena ayahnya kiai, dan kakeknya lagi, dari pihak ayah ataupun ibu, semua kiai.

Begitu juga posisi Gus Dur. Memang hanya darah kiai bisa mengalir ke dalam tubuh kiai. Ini seolah menggarisbawahi pepatah Arab yang intinya mengatakan, “tak mungkin buah anggur dipetik dari pohon berduri.”

Tetapi, Gus Dur menjadi kiai juga karena *achieved status*. Seorang pengamat yang berkali-kali mengatakan posisi istimewa Gus Dur di NU diperoleh lantaran ia memanggul warisan darah biru, jadi juga posisi *ascribed* tadi, bagi saya merupakan penilaian parsial, dan mengabaikan kenyataan bahwa ia pun memanggul posisi yang diperoleh karena prestasi pribadi.

Jauh sebelumnya ia bergaul di kalangan para santri di berbagai pesantren. Mungkin terutama di Pesantren Tegalrejo Magelang, dan Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. Beberapa pesantren lain mungkin disinggahi dalam waktu pendek.

Di masa dewasanya, ia pun masih “nyantri” kepada seorang kiai tarekat di Kebumen. Kecuali itu, juga sangat dekat dengan sejumlah kiai yang di dunia NU disebut *khariqul ‘adah*—kiai-kiai ~~nyenda~~—karena pada hakikatnya mereka menatap dimensi lain dalam hidup, yang tak tampak oleh cara pandang biasa. Gus Miek—*Allahu yarham*—Mbah Lim, dan Kiai Son Haji, mungkin bisa menjadi sebagian contoh yang patut dikemukakan.

Dengan begini jelas bahwa masa “kesantriannya” – masa memperdalam pengenalan atas dunia kiai – sambung menyambung sampai saat ia sendiri sudah “tidak berhak” lagi disebut kiai. Tak mengherankan bahwa rangkaian pengalaman sosial ataupun spiritual itu membentuk pemahaman yang hangat dan dalam tentang dunia kiai tadi.

Pemahamannya itu, kalau ditulis – dalam bentuk buku ilmiah ataupun novel – saya kira bisa menjadi karya penting. Ia akan menjadi penting terutama karena mungkin tak mengandung distorsi sebagaimana karya orang luar. Dan mungkin buku itu pun akan tampil hangat tanpa kehilangan sikap kritis terhadap setiap keping persoalan yang dibahasnya. Ia membedah bukan dari luar sebagaimana lazimnya pengamat, melainkan dari dalam, karena ia memang sudah ada di sana.

* * *

Buku kumpulan esai *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah* ini membuktikan watak hangat tanpa kehilangan sikap kritis itu. Penerbitnya – didukung oleh sejumlah intelektual muda NU yang bergairah, dan yang tak diragukan lagi menjadi penjaga garis belakang pemikiran Gus Dur – menyebutnya “Antropologi Kiai.”

Saya menduga sebutan itu diberikan karena esai-esai Gus Dur yang terkumpul dalam buku ini terutama bermain di wilayah kehidupan pribadi para

kiai–wilayah yang tak banyak orang mengetahuinya. Sorotan lampu kamera Gus Dur diarahkan pada titik dramatik–mungkin yang paling dramatik–dari tiap soal, tiap individu kiai, yang dibahasnya. Kekuatan penalaran, ketulusan, kesalehan, dan kearifan yang dipetik dari berbagai variasi pengalaman yang berbeda itu–saya kira–yang bisa disebut merk khusus tiap-tiap kiai yang ditampilkannya.

Dan itu yang membikin tulisan-tulisannya, yang berisi cerita–lebih tepat penggalan *life history*–dari kehidupan para kiai, memiliki gaung lebih keras yang tetap terngiang di telinga para pembaca setelah hampir dua dasawarsa kemudian. Mungkin ini tanda–atau salah satu tanda–sukses sebuah tulisan.

Tak sepotong pun penjelasan diberikan mengapa “Kiai Nyentrik Membela Pemerintah” dipilih menjadi judul buku ini? Pada mulanya, esai itu–dimuat *Tempo*, 5 April 1980–menjelaskan posisi “menyimpang” Kiai Muchit dari Jember itu. Ia seorang ulama “tradisional” yang mahir berpikir “modern,” misalnya bicara *real politics* menjadi anggota DPRD, berhubungan dengan bupati, dan menjadi dosen di sebuah universitas setempat.

Ia mungkin–kata Gus Dur–tipe ulama-intelekt, yang komitmennya tercurah pada perjuangan meratakan pesan perbaikan moral pribadi. Ia disebut lebih realistik, lebih *ade* dari intelektual-ulama, yakni sarjana dalam bidang non-agama, tetapi mengajarkan agama dengan militansi yang menakutkan.

Esai mengenai Kiai Muchit ini memanggul pesan penting: orang harus giat menampakkan keberanian moral, termasuk melawan segenap kesalahan meskipun itu dilakukan umatnya sendiri. Implikasinya, ia pun rela dihujani caci-maki umatnya. Bahkan ia diberi tuduhan buruk: membela pemerintah.

Persoalannya begini: saat aksi sepihak PKI dilancarkan, ia malah menentang kiai-kiai yang tidak mau menerima UUPA dan UUPBH. Para kiai menyampaikan argumen bahwa dalam mazhab Syafi'i yang kita anut, tidak ada perkara pembatasan hak milik pribadi.

“Tapi, bukankah ada larangan memperoleh hak milik secara tidak halal? Dapatkah *sampelan* membuktikan bahwa, misalnya, 50 hektar tanah milik petani kaya itu diperoleh dengan cara halal?”, kata Kiai Muchit. “Bukankah si kaya merampas si miskin yang tak mampu menebus sawahnya yang tergadai?” Orang pun marah kepadanya. Tuduhan membela pemerintah itu bukan cuma menempatkannya dalam posisi tak nyaman, melainkan juga buruk, sangat buruk, terutama dalam kurun zaman ini. Di saat pemerintah memperlihatkan cengkraman kuku-kukunya yang tajam ke seluruh sektor kehidupan rakyat, dan karena itu rakyat kelihatan–hampir dalam semua hal–tak berdaya menghadapi kekuasaan yang cenderung tidak adil, membela pemerintah dianggap dosa politik yang tak berampun.

Apa yang terjadi hampir dua puluh tahun lalu itu kini terjadi lagi, justru kepada Gus Dur. Ia pun saat ini—ketika kata pengantar buku ini tengah ditulis—disembur kiri-kanan termasuk juga oleh komunitasnya sendiri—karena berjinak-jinak dengan Golkar, dan itu artinya juga dianggap membela pemerintah. Kecuali Kiai Muchit, Gus Dur pun kiai “nyentrik” yang sedang dituduh membela pemerintah.

Buat Kiai Muchit, ia menjelaskan, “Siapa bilang ulama-intelektual tak harus memiliki keberanian moral?” Berani untuk—sekali lagi—menerima risiko dianggap berdosa secara politis. Untuk dirinya sendiri tak ada penjelasan yang saya dengar. Penjelasan sikap Gus Dur diberikan oleh Cak Nur dan Romo Mangun.

Kata Cak Nur, berkali-kali: “Sekarang ini pun pendirian saya mengenai Gus Dur tetap seperti dulu. Kita *share* gagasan besarnya dan abaikan renik-renik kecil yang sukar kita pahami. Itu saja.” Dan apa kata Romo Mangun.

“Posisi saat ini bisa berbahaya sebab lumpuhnya PDI otomatis menempatkan PPP sendirian dan langsung berhadapan dengan Golkar, dengan pemerintah. Secara teoretis-ideologis, PPP dianggap simbol negara. Sementara kalangan menilai, posisi semacam ini punya potensi besar untuk menimbulkan ledakan politis seperti yang terjadi di masa lalu, atau seperti pengalaman Aljazair. Dan Gus Dur saya kira sejak lama memperhitungkan kemungkinan yang tak disukainya itu. Karena itu ia dekat dengan Golkar untuk menjelas-

kan kepada khalayak bahwa tak semua sayap Islam bersedia memperhadapkan posisi ideologis-formil keislamannya pada yang bukan Islam, termasuk negara.”

Agak sukar saya memahami penjelasan ini. Soalnya, saya tidak yakin PPP mampu “memanipulir” umat untuk memihak kepadanya, bahwa ia wakil sah Islam. PPP belum tentu sebesar itu wibawanya. Sejak lama orang sadar, PPP bukan otomatis “rumah” umat Islam.

Alasan yang saya lihat malah tampak pada penjelasan Gus Dur pada posisi Kiai Muchit tadi. Hal itu juga pernah dikatakannya ketika ia dikecam karena tidak ikut demo membela *Tempo*, *Editor*, dan *DETIK*, ketika SIUPP mereka dicabut pemerintah. Katanya, dalam perjuangan orang itu harus berani dianggap pengecut.

Sekarang ini, membela pemerintah dinilai lebih dari sekadar pengecut. Dalam perjuangan lebih besar, saya kira Gus Dur memang bersedia mempertaruhkan kredibilitasnya. Ia rela kehilangan kepercayaan umatnya sendiri. Baginya, mungkin, ada sikap politik yang tak perlu dijelaskan kepada umat. Dan tebusannya mahal sekali: ia berani mengambil risiko menjadi korban umpatan massa. Sama dengan pilihan Kiai Muchit dalam esai di atas.

* * *

Esai-esai selebihnya mencerminkan variasi ke-arifan, sikap humoris, ketulusan, dan kesalehan para kiai yang “ditangkap” Gus Dur secara jitu. Dunia pesantren sering “mengecoh” banyak kalangan, termasuk pejabat-pejabat negara, para wartawan, dan para pengamat ilmiah. Ketika koran-koranewartakan konflik intern secara dahsyat, orang mengira perpecahan di NU sebentar lagi terjadi. Tak tahunya, ketika NU ketemu sesama NU dalam suatu perhelatan biasa—di mana politik tak boleh hadir—mereka saling rangkulan. Dan “perang” di media massa itu seperti tak ada artinya sama sekali.

Setahu saya, belum ada media massa—maksudnya wartawan, juga wartawan dari keluarga NU sendiri—yang paham perkara ini hingga ia tak perlu ikut-ikutan gugup. Tidak juga ilmuwan NU. Tapi, anehnya, Gus Dur tahu lekuk-lekuk persoalan itu. Dan ia tampaknya paham hal itu sejak dulu, saat ia menulis perkara kiai dan NU di media massa.

Esai-esai yang disebut “Antropoligi Kiai” ini memberi kita gambaran lebih jelas. Dan itu saya kira, karena Gus Dur memiliki kesediaan untuk terlibat secara total dan kedalaman empati ketika kepadanya disodorkan tiap-tiap soal—bagi saya itu artinya “ayat-ayat” Tuhan—yang menuntut pemahaman dan pemecahan.

Jakarta, 7-7-1997

Daftar Isi

Pengantar Redaksi ❧ v

Kata Pengantar: Mohammad Sobary ❧ vii

Daftar Isi ❧ xvii

1. Pesantren dan Ludruk ❧ 1
2. Kiai Nyentrik Membela Pemerintah ❧ 7
3. Kiai Chasbullah dan Musuhnya ❧ 13
4. Sulit Masuknya, Mudah Keluarnya ❧ 17
5. Kiai Ikhlas dan Ko-Edukasi ❧ 21
6. Rasionalitas Kiai Adlan ❧ 25
7. Kiai Razaq yang Terbakar ❧ 29
8. Ketat Tetapi Longgar ❧ 35
9. Kiai Iskandar dan Pak Damin ❧ 41
10. Bersatu dalam Menuntut Ilmu ❧ 47
11. Baik Belum Tentu Bermanfaat ❧ 53
12. Tokoh Kiai Syukri ❧ 57
13. Sang Kiai dan Keyakinannya ❧ 61

Kiai Nyentrik Membela Pemerintah

14. Dunia Nyata Kiai Zainal ❧ 67
15. Ustadz yang Hidup dalam Dua Dunia ❧ 73
16. Bila Kiai Berdebat ❧ 79
17. Kiai Dollar Berdakwah ❧ 83
18. Syaikh Mas'ud Memburu Kitab ❧ 87
19. Kiai Pencari Mutiara ❧ 93
20. Yang Umum dan Yang Khusus ❧ 99
21. Skala Prioritas Ibadah ❧ 103
22. Dokter Idealis Kiai Formalis ❧ 107
23. Mu'allim Syafi'i ❧ 111
24. *In Memoriam*. Kiai Achmad Shiddiq ❧ 115
25. Gus Miek: Wajah Sebuah Kerinduan ❧ 123
26. Tuan Guru Faisal, Potret Kepribadian NU ❧ 131

Sumber Tulisan ❧ 139

Pesantren dan Ludruk

Karena ludruk berasal dari Jombang, ada kawan yang bertanya apakah pesantren yang menjadi penciptanya? Bukankah daerah itu daerah pesantren, mengapa sampai kesenian rakyat yang satu ini justru muncul di sana?

Pertanyaan sambil bergurau ini ternyata membuka cakrawala baru dalam melakukan pengamatan atas kehidupan kaum santri kita di masa lampau. Sudah tentu dengan implikasinya sendiri bagi masa datang, karena ia berhubungan dengan masa depan agama Islam di Tanah Jawa, *dus* menyangkut negara kesatuan tercinta ini.

Ah, terlalu melamun. Apa hubungan ludruk dengan masa depan Islam? Sudah yang berkaitan dengan pesantren belum dijelaskan, ditambah lagi proyeksi gombal yang terlalu jauh ini!

Tetapi, kenyataan memang demikian. Islam mendarat dan lalu tertanam lebih kuat di kawasan pantai utara Pulau Jawa, lalu sedikit demi sedikit memasuki wilayah pedalaman. Di Jawa Tengah, yang menjadi pusat kekuasaan yang menunjang budaya

asli Jawa di garis pintas Solo-Kartasura-Yogya, terjadi proses interaksi yang bersifat seru, tetapi berumur tidak terlalu lama—antara budaya asing Jawa itu dan budaya Islam yang baru datang.

Segera tercapai keadaan *statusquo*, bak orang berperang mencapai gencatan senjata: diakui budaya asli Jawa untuk memanifestasikan aspirasi keagamaan Islam di banyak wilayah kehidupan di pedalaman Jawa Tengah itu. Wayang dinikmati bersama, kiai pura-pura tidak tahu kalau ada perempuan tampil dalam pagelaran kesenian setempat, bentuk masjid tradisional mengambil pola arsitektur ke-Jawa-an sejauh mungkin. Blangkon dan destar, bukannya peci dan kopiah haji, yang jadi tanda pengenalan kaum santri pedalaman Jawa Tengah dahulu.

Baru kalau sudah kiai atau ingin dianggap memiliki derajat kekiaian lalu ada keinginan memakai sorban, seperti Pangeran Diponegoro. Tari rakyat *kestrung* digunakan sebagai media ekspresi keagamaan di Magelang, ditarikan di luar tempat formal bagi upacara keagamaan (masjid, surau, dan sebagainya).

Pedalaman Jawa Timur lain lagi keadaannya. Pengaruh budaya asli Jawa tidak begitu kuat tertanam seperti di Jawa Tengah, mungkin karena terlalu jauh letaknya dari pusat kekuasaan waktu itu. Situasi gencatan senjata tidak segera tercapai.

Kaum santrinya lebih seram “menangani” keterlibatan aspek-aspek keagamaan. Tekanan kepada

spiritualitas kaum tarekat dan legalisme kaum ahli fiqh menjada watak utama kehidupan masa itu di kawasan pedalaman Jawa Timur. Perempuan ikut pagelaran seni secara terbuka? Oh, tidak boleh, ini salah satu contohnya.

Dalam perbenturan dan pergolakan kedua kekuatan sosial-budaya itu, karena inisiatif menyerang berada di tangan kaum santri, perlu didatangkan bala bantuan. Bukankah sikap menyerang membutuhkan lebih banyak pasukan? Kaum santri pedalaman Jawa Timur tidak membutuhkan bala bantuan prajurit, karena ini bukan peperangan fisik; mereka membutuhkan bala bantuan opsir pemimpin serangan.

Untuk pergulatan sosial-budaya, adakah yang lebih tepat dari bala bantuan perwira berupa kiai sebagai “barisan opsir agamawan?” Adakah cara lebih tepat dari proses perkawinan, dengan cara “mengambil” menantu calon-calon kiai dari pantai utara? Bukankah bentangan kawasan pesisir dari Cirebon di Jawa Barat hingga Sedayu di dekat Surabaya merupakan sumber penyediaan calon ulama tangguh, dengan rangkaian pesantren-pesantren kunonya?

Asy'ari (ayah pendiri Pesantren Tebuireng, K. Hasyim) berasal dari Demak, diambil menantu K. Usman Jombang. Kedua kakak-beradik, Ma'sum dan Adlan Ali dari Sedayu, juga lalu “mangkal di Jombang, seperti halnya Bisri Syansuri yang berasal dari Tayu (Pati) dan Idris Kamali yang lahir di Cirebon. Makhrus Ali dari Cirebon juga, kini memimpin pesantren besar

di Kediri. Juwaini dan Jauhari adalah pemuda-pemuda Pati yang kemudian bermukin di Jawa Timur juga.

Semua calon kiai itu kini telah membentuk barisan kiai tangguh yang dituakan oleh masyarakat. Pesantren-pesantren Lirboyo, Kencong (Jember), Kretek (Kediri), dan Tebuireng adalah daerah kepemimpinan mereka sekarang ini. Merekalah yang jadi pimpinan serangan sosial-budaya kaum santri di garis lintas timur-barat Surabaya hingga Madiun dan garis tenggara-barat laut Banyuwangi ke Jombang.

Belum lagi menantu-menantu baru masa kini, yang baru memulai aksi mereka di atas pentas: Aziz Masyhuri dan Yusuf Masyhar dari Tuban, yang kini berdomisili di Jombang, dan lain-lainnya lagi. Proses saling penguatan yang menarik untuk dikaji dengan medium perkawinan antarsesama keluarga kiai tangguh dan tujuan “perjuangan” (sebagaimana mereka yakini sendiri) sosial budaya yang intens.

Tidak heran jika lalu sikap kurang akomodatif terhadap aspek-aspek kesenian asli Jawa lebih berkembang di Jawa Timur: pagelaran kesenian keagamaan umumnya berlangsung di tempat-tempat peribadatan formal (masjid dan sebagainya), seperti kesenian hadrah. Wayang lebih sedikit dipertunjukkan, tayuban boleh hanya kalau bukan musim giling pabrik gula, dan seterusnya.

Perempuan tetap tidak boleh memeragakan diri dalam pagelaran di muka umum. Sudah wayang sangat

sedikit dipertunjukkan, melihat penari non-perempuan kurang asyik. Bagaimana kalau drama urakan dengan pemain laki-laki berperan sebagai perempuan? Lahirlah ludruk sebagai “*satusquo* kecil”. Pencipta aslinya adalah kelompok-kelompok seniman yang nantinya melahirkan Markuat serta Markaban (ah, betapa masih santrinya nama-nama mereka!).

Itu semua masa dahulu. Bagaimana sekarang? Yang tua dan yang muda sama saja. Lelaki-perempuan diterima juga. Namun demikian, tradisi akomodasi yang datang belakangan ini tentu tidak sama manifestasinya dengan keakraban lama yang ada antara budaya asli Jawa dan budaya santri di pedalaman Jawa Tengah.

Kalau keakraban lama ini dapat menghasilkan kreasi budaya yang lebih mampu menangani masalah kesenjangan sosial-budaya di antara golongan yang berbeda-beda di negeri ini, bukankah peranan mereka akan sangat vital? Dan kalau ini terjadi secara nyata, bukankah manifestasi hidup kesiantrian juga lalu akan mengalami perubahan-perubahan mendasar?

Kalau keadaan demikian yang benar-benar terjadi, siapakah yang akan dapat menyangkal terjadinya perkembangan menentukan bagi masa depan Islam di negeri ini? Ada yang melakukan penyangkalan seperti itu, yaitu kenyataan sejarah di masa depan, atau justru membuktikannya.



Kiai Nyentrik Membela Pemerintah

Orangnya peramah, tetapi lucu. Raut wajahnya sepenuhnya membayangkan ke-kiai-an yang sudah mengalami akulturasi dengan “dunia luar”. Pandangan matanya penuh selidik, tetapi kewaspadaan itu dilembutkan oleh senyum yang khas.

Gaya hidupnya juga begitu. Walaupun sudah tinggal di komplek universitas negeri, masih bernafaskan moralitas keagamaan. Gaya bicaranya juga ada dua macam. Di hadapan “orang luar”, ia sedikit berbicara dan lebih banyak “meladeni”. Tetapi, di tengah “rakyatnya” sendiri, ia memakai gaya pengajian seratus persen.

Itulah Kiai Muchit (yang ejaannya belum disesuaikan EYD) yang mampu berbicara tentang riil politik lokal dengan bupati di wilayahnya ketika ia menjadi wakil ketua DPRD, tetapi yang dengan santainya membuka pengajian umum dengan humor.

Apakah tipe kiai begini yang jadi citra “ulama-intelekt” yang begitu didambakan orang-orang Departemen Agama, kita tidak tahu persis. Bagaimanapun

juga, kredibilitasnya untuk itu cukup kuat: ia kiai populer berilmu agama mendalam, sekaligus jadi dosen universitas (walaupun hanya untuk mata kuliah agama).

Setidak-tidaknya ia tipe yang lebih realistis dan lebih memikat hati daripada sejumlah sarjana dari disiplin non-agama, tetapi yang mengajarkan agama, dengan kegalakan dan militansi yang terasa menakutkan—wakil dari tipe “intelek-ulama.”

Menghadapkan jenis silang “ulama-intelek” dan “intelek-ulama” memang kerja mengasyikkan. Di satu segi, jenis pertama banyak dimodali keakraban hubungan bermacam-macam lapisan masyarakat, karena kelonggaran pendekatan yang dilakukannya. Jenis kedua justru lebih sering didorong oleh semangat menyala untuk membuktikan kebenaran agama melalui argumentasi dan dalil-dalil ilmiah, yang sudah tentu sering menghasilkan polemik dengan “orang luar.”

Pada segi lain, “ulama-intelek” menekankan pesan mereka pada ajakan perbaikan akhlak pribadi. Sedangkan jenis “intelek-ulama” lebih senang menawarkan tema besar—misalnya, superioritas peradaban Islam, dsb.

Keberanian Moral

Kedua pendekatan yang tampak saling berbalik punggung itu sepenuhnya tergantung pada keberanian

moral untuk mempertahankan pendirian dan keyakinan.

Pada jenis “intelekt-ulama”, hal itu tampak jelas, bahwa ada sarjana disiplin non-agama berbicara soal-soal keagamaan, jelas dibutuhkan keberanian moral untuk itu sejak semula. Paling tidak di hadapan yang tadinya bingung, melihat adanya insinyur fisika inti yang bersusah payah menghafalkan al-Qur'an, ada profesor seni rupa sibuk dengan konsep-konsep dasar kemasyarakatan Islam, dan ada dokter yang giat bertabligh (sudah tentu dihadapkan ejekan tentang praktiknya yang mungkin tidak kaku).

Yang lebih sulit adalah mengetahui keberanian moral apa yang dibutuhkan untuk menjadi “ulama-intelekt.”

Sejak semula, jenis ini telah membatasi diri jadi pengikut yang mencoba berpikir secara disiplin non-agama, tetapi tidak pernah mengajukan klaim jadi pelopor dalam disiplin yang bersangkutan. Tidak perlu ada keberanian moral dari sudut penglihatan ini. Bahkan rakyat awam yang menjadi pemujanya sudah kagum sekali, dengan sekadar satu-dua contoh dari dunia disiplin non-agama yang mereka paparkan dalam pengajian. Tetapi, keberanian moral yang harus mereka miliki justru terletak pada pergaulan masyarakat untuk menyatakan benar apa yang benar dan menyatakan salah apa yang salah.

Ini banyak mengandung risiko, karena sering membuat mereka berhadapan tidak saja dengan “orang

luar,” tetapi lebih-lebih dengan kelompok dari mana mereka berasal dan di mana mereka memimpin.

Contohnya Kiai Muchit ini. Di masa menghebatnya aksi sepihak PKI dilancarkan, ia harus ribut dengan kiai-kiai lain yang menentang UUAP dan UUPBH. Para kiai itu memakai argumentasi bahwa tidak ada pembatasan hak milik pribadi dalam mazhab Syafi'i.

Tetapi, Kiai Muchit menyelamatkan diri secara politis dengan pertanyaan: walaupun tidak ada pembatasan seperti itu, bukankah ada larangan memperoleh hak milik secara tidak halal? Dapatkah *sampeyan* membuktikan bahwa petani kaya yang mempunyai 50 hektar tanah memperoleh dengan halal? Bukankah perampasan si kaya atas si miskin melalui gadaian sawah yang kedaluwarsa? Atau sebagai sitaan atas barang jaminan yang jadi milik semenggga-semenggga dari petani miskin?

Waktu itu, ia didamprat kanan-kiri, sampai-sampai mendapat predikat yang dalam istilah sekarang sama dengan “nyentrik.”

Kasus Jenggawah

Kini kiai nyentrik ini didamprat kanan-kiri karena sikap moralnya, lagi-lagi dari kalangan umatnya sendiri. Dalam kasus tanah Jenggawah, yang kebetulan terjadi di wilayah domisilinya sekarang, ia menyimpang dari pola agitasi demagogik yang dilancarkan parpolnya (bersama parpol lain) untuk “memperjuangkan

kepentingan petani” melawan PT. Perkebunan (PTP) yang bersangkutan di sana.

Ia tahu persis, bahwa agitasi itu tidak tepat dan tidak mengenai sasarannya, karena yang benar memang adalah pihak PTP. Ia tahu juga bahwa bukan tanpa pamrih PTP melakukan *he-kawedintanah* garapan di Jenggawah, yang memang secara formal masih milik negara. Tetapi, ia sama sekali tidak berubah pendiriannya di hadapan kemarahan umat itu.

Soal utamanya adalah tanah garapan yang telah terbagi-bagi secara tidak adil dalam waktu sekian lama di antara para penggarap sekarang ini. Ada yang punya 20 hektar, tetapi kebanyakan hanya punya seperempat hektar saja. Tadinya memang sama luas tanah garapan masing-masing, tetapi nasib telah membawa pada transfer penguasaan tanah.

Sudah tentu besar upaya meratakan kembali besarnya tanah garapan masing-masing, kalau dilihat dari pandangan agama, menurut kiai nyentrik kita yang satu ini. Persoalan utama ini harus dilepas dari ekses-ekses tindakan para oknum PTP, yang harus diselesaikan pada waktunya nanti.

Sikap ini memang tidak populer. Ia terkena tuduhan “membela pemerintah,” sebuah dosa asal yang sulit diampuni dalam pemikiran kepartaian yang belum matang di negeri ini. Apalagi dipandang sementara pemimpin lokal yang langsung atau tidak

Kiai Nyentrik Membela Pemerintah

langsung dibiayai oleh para petani yang memiliki tanah garapan 20 hektar!

Ia langsung dikucilkan dari solidaritas umat saat ini, karena sikap moral keagamaannya yang seperti itu (atau justru karena sikap intelektualitasnya?)

Nah, siapa bilang ulama-intelekt tidak harus memiliki keberanian moral?

Kiai Chasbullah dan Musuhnya

Kiai Chasbullah Salim almarhum memang orang yang luar biasa. Orang Sedan (Rembang) yang kemudian tinggal di Jombang ini, senang dengan keterusterangan sikap dan ucapan. Lugas dalam berbicara, teguh dalam bersikap, berani melawan yang dianggap tidak benar.

Sering kali hanya pakai “celana kiai” (celana dalam “midi” hanya sampai sedikit di bawah lutut, biasanya dibuat dari kain belacu) sonder kaus dalam, kiai yang satu ini menganggap penegakan hukum agama sebagai inti perjuangan hidupnya. Keseluruhan hidupnya diabdikan untuk mengajar orang banyak di kampungnya yang akan banyak aspek kehidupan individual dan masyarakat yang belum sesuai dengan perintah Islam. Pendekatannya langsung ke pokok persoalan. Tidak selesai dengan adu argumentasi, kalau perlu adu jotos. Mula-mula mendirikan ranting NU di Desa Denanyar, harus berkelahi fisik karena diejek terus-menerus oleh “orang abangan” di tempat itu. Tidak heranlah sewaktu dia pindah ke Desa Rejosari (8 km ke barat-daya), segeralah ia terlibat dengan kasus baru yang dihadapinya. Di desa yang bersebelahan dengan Gading-

mangu, muncul gerakan baru bernama Darul Hadis. Di bawah pimpinan “Amirul Mukminin” Abu Hasan Ubaidah, gerakan itu kini memiliki nama lain, Islam Jama’ah, yang sempat membuat heboh beberapa waktu yang lalu.

Di tahun-tahun 50-an, belum ada Majelis Ulama Indonesia, jadi Kiai Chasbullah harus berjuang sendirian melawan “bahaya dari Timur” desanya itu. Sesuai dengan kelugasan seorang agamawan yang berpegang teguh pada keyakinan agama yang dianggapnya benar, ia segera mengajukan tantangan berdebat.

Diceritakan kepada penulis, pedebatan berjalan dua kali, di muka umum dalam rapat terbuka di atas mimbar. Pertama kali Kiai Chasbullah tidak berhasil mematahkan argumentasi lawan, ia langsung berteriak “siapa yang benar?”, dan publik langsung membenarkan dia. “Satu nol untuk pihak saya”, katanya.

Kali kedua, pihak Darul Hadis tidak mau dengan syarat begitu itu. Kembali adu argumentasi berlangsung secara bertele-tele. Saling mengalahkan. “Setelah capek saya berdebat dan dia kelihatan tidak akan menyerah, langsung saya pukul dia. Saya menang lagi, dua nol untuk golongan saya,” ucap kiai kita ini dengan polosnya.

Sudah tentu perkembangan gerakan Ubaidah itu tidak berhenti hanya dengan skor dua nol itu. Homogenitas paguyubannya dan kohesi masyarakatnya membuat Darul Hadis semakin kokoh di Gadingmangu.

Bagaimana halnya dengan Kiai Chasbullah? Beliau mengatakan kepada penulis beberapa waktu sebelum wafatnya beberapa tahun yang lalu: “Biar saja. Gurunya Ubaidah dulu, almarhum Kiai Zaid Semelo, pernah bilang kalau kenakalan Ubaidah tidak usah digubris. Nanti kan hilang sendiri kenakalan itu kalau dia mati. Ini omongannya wali lho! Lagi pula sudah ada saling pengertian antara saya dan pengikutnya di Gadingmangu. Tidak kita apa-apakan, asal mereka tidak tabligh ke desa lain di sekitarnya, serta tidak membeli tanah di desa saya ini. Biar saja, *bæik kætik ala kætara*.”

Tampak kiai yang sepiantas lalu tampak kasar sikapnya ini, karena kelugasannya dalam berbicara dan bersikap, menyimpan kearifannya sendiri. Pertentangan pendapat tidak semuanya diselesaikan, dan lebih-lebih tidak akan terselesaikan dengan melarang begini atau begitu. Adakalanya toleransi lebih memberikan hasil, sebagai upaya menahan perluasan pengaruh lawan. Dalam bahasa politik luar negerinya mending Dulles, sikap menahan perluasan pengaruh ini diistilahkan sebagai *containment policy*. Cuma saja, Dulles tidak toleran kepada pihak lawan, main kepung saja dengan fakta-fakta pertahanan. Karena ini tidak searif Kiai Chasbullah.

Mungkin Majelis Ulama Indonesia, yang pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk melarang Islam Jama’ah, dapat belajar banyak dari “strategi perjuangan” model Kiai Chasbullah ini.

Setidak-tidaknya, toleransi kepada gerakan-gerakan “sempalan” (*splitter group*) dalam Islam harus diperhitungkan sebagai salah satu jalan terbaik untuk mendewasakan sikap hidup umat secara keseluruhan. Bukankah kasihan umat yang harus melihat musuh di setiap pojok jalan dan seluruh penjuru angin?

Sulit Masuknya, Mudah Keluarnya

Kalau ucapan di atas menimbulkan asosiasi yang tidak-tidak dalam pikiran, ya pantas saja. Apalagi diucapkan seseorang yang di waktu senggang senang berbincang-bincang tentang tanda-tanda perempuan cantik (“lihat dulu tumitnya”), atau *ngglamat*-nya perempuan banyak anak (*walud*, menurut bahasa pesantren) dan banyak bercerita tentang cara-cara “menjinakkan” istri yang rewel dan cerewet.

Tetapi, ternyata bukan pengertian porno yang jadi arah ucapan tersebut. Kiai Wahab Chasbullah menggunakannya sebagai motto sikap hidupnya dalam menghadapi perkembangan politik semasa NU masih menjadi partai dahulu.

Dalam kasus pembubaran DPR hasil Pemilu 1955, Kiai Bisri Syansuri sebagai wakilnya dalam Syuriah PBNU, mati-matian menolak tindakan politik mendiang Presiden Soekarno sehabis mendekritkan kembalinya UUD 1945 pada 1959 itu. “Tidak sah membubarkan DPR hasil pilihan rakyat,” katanya. Haram untuk ikut dalam DPR-GR yang dibentuk

secara tunjuk belaka sebagai gantinya. Masyumi dihilangkan haknya di situ, berarti hak seperempat jumlah rakyat pemilih, yaitu mereka yang mencoblos tanda Bintang Bulan dalam Pemilu 1955. Dan ini berarti pencurian hak orang banyak, *ngasab* menurut bahasa pesantren diambalikan dari kata *ghashab* yang berarti pengambilan hak orang lain secara tidak sah.

Begitulah kurang lebih pendapat Kiai Bisri dalam perdebatan sengit pada sidang syuriah kala itu. Merah mukanya, suaranya semakin lama semakin lantang, punggungnya semakin tegak dengan ketahanan duduk bersila berjam-jam lamanya tanpa mengubah posisi sama sekali. Tangannya juga berkali-kali memukul meja marmer yang dijadikan meja sidang. *Saur manuk*, kata orang Jawa mengenai prosedur rapat yang sudah kacau balau itu; saling bersahutan antara dua lawan pendirian itu, tanpa mengindahkan lagi wewenang mengatur lalu lintas berbicara di tangan ketua sidang. Bagaimana akan tertibkan kalau yang berdebat begitu seru adalah justru Rais 'Am Kiai Wahab dan Wakil Rais 'Am-nya Kiai Bisri?

Sampeyan seenaknya saja membuat keputusan hukum agama, terlalu murah. Tidak memperkuat keyakinan agama, nanti orang terbiasa memudahkan ajaran agama. Bagaimana jadinya umat kita nanti kalau sudah begitu? *Sampeyan* yang menjadi sebab, begitu-lah kira-kira rangkaian tuduhan Kiai Bisri kepada iparnya, Kiai Wahab.

Sampean sendiri yang main keras saja. Yang akan kita berikan keputusan ini adalah orang banyak, tidak seperti kita. Banyak yang tidak kuat pakai cara *sampean* ini. Antara yang berat dan ringan dalam soal agama, justru hanya diambil ringannya kalau menyangkut proyek orang banyak. “Kiai populis” Wahab Chasbullah yang punya sedan Opel kapitan model terbaru tahun ini menudingkan “tuduhan main keras” itu kepada “Kiai elitis” Bisri Syansuri yang tidak pernah punya mobil satu pun dalam kehidupannya.

Mari kita ambil yang ringan saja dalam masalah DPR-GR ini. *Ghasban* atau tidak belum pasti. Yang jelas kalau tidak masuk, bukannya hak Masyumi saja yang hilang. Umat Islam semuanya juga akan kehilangan hak mereka. Ini satu-satunya peluang untuk memperjuangkan hak di lembaga perwakilan rakyat di negeri kita saat ini. Sulit untuk masuk kalau tolak kali ini. Kalau memang sudah ternyata nanti bertentangan dengan keyakinan agama, kita dapat keluar bersama-sama. Masuknya sulit, keluarnya mudah.

Dan seperti biasanya, Kiai Bisri tetap pada pendiriannya, sedangkan Kiai Wahab jalan terus. NU mempersilakan yang setuju untuk menerima keanggotaan DPR-GR itu. Pada yang berkeras, dipersilakan agar menolak. Sedang kedua kiai tua yang beriparan itu tetap saja berbeda pendapat dalam hampir semua persoalan, sambil tetap menghargai satu sama lain dalam kehidupan pribadi mereka.

Tidak heranlah jika terjadi metamorfose pada waktu Kiai Wahab wafat dan Kiai Bisri menggantikannya sebagai Rais 'Am pada 1972. Kiai Bisri lalu bersifat “ngemong” pada cara berpikir Kiai Wahab, seolah-olah ingin menyatukan kedua kecenderungan itu dalam membuat keputusan.

Maklum, sejak waktu itu hingga saat kepulangannya ke rahmatullah beberapa waktu yang lalu, Kiai Bisri harus sering mengambil keputusan sendirian saja. Lain-lainnya di PBNU dan kemudian di DPP PPP lebih berperan menyediakan bahan pertimbangan. Siapa berani coba-coba adu pendapat dengan “Mbah Bisri,” kalau tidak punya senjata ajaib seperti motto Kiai Wahab; sulit masuknya, mudah keluarnya itu?

Kiai Ikhlas dan Ko-Edukasi

Kiai Sobari sudah berusia lebih dari tujuh puluh tahun. Tidak lagi kuat berpergian jauh-jauh dari rumah. Terkena angin sedikit bisa kumat asmanya yang sudah menahun. Sudah hampir dua tahun ia berhenti mengajar di Pesantren Tebuireng, yang terletak 5 km dari desanya. Selama 33 tahun jarak itu ditempuhnya hampir setiap hari, untuk menunaikan tugas mengajar, yang dirumuskannya sebagai “membayar utang ilmu kepada Hadratus Syaikh Kiai Hasyim Asy’ari.”

Ia tidak meminta jabatan formal apapun di pesantren itu, tak mengharapkan imbalan apapun.

Corak kiai yang begini disebut oleh kalangan pesantren sebagai orang yang ikhlas, tulus tanpa pamrih dalam pengabdianya. Mungkin karena ikhlasnya itulah do’anya lebih diterima oleh Allah, begitu komentar orang banyak.

Karena itu, pantas kalau khalayak ramai banyak meminta dido’akan agar sembuh dari penyakit atau lepas dari gangguan bermacam-macam, dari yang ber-sumber dari makhluk halus hingga ke persoalan kasar.

Gurauannya lembut dan menunjukkan kerendahan hati. Dan dengan keteguhan jiwa orang telah menemukan dirinya sendiri, kiai yang satu ini dihormati semua orang, dicintai murid-muridnya, dan disegani mereka yang mendapat perintah atasan untuk mengimbangi pengaruhnya dengan berbagai macam cara.

Kesederhanaan hidupnya menjadi contoh bagi rakyat kecil untuk menanamkan derita yang timbul dari berbagai macam cobaan dalam hidup.

Tetapi, tidak semua begitu cerah seperti digambarkan di atas. Pendiriannya yang sekokoh karang penghadang hempasan ombak di laut lepas, sering kali membuat sulit orang lain.

Ia memang tidak sengaja membuat sulit, tetapi toh kesulitanlah yang muncul dari kiai itu. Pejabat yang harus mensukseskan program KB bisa pusing tujuh keliling mendengar permintaannya kepada rakyat agar sebanyak-banyak anak. “Himbauan”-nya agar santri hanya mengurus “ilmu agama” membuat repot guru aljabar yang mengajar di kelas sebelah. Moralitasnya yang utuh dan bulat, tetapi berjalan tunggal, sering membingungkan anak-anak muda yang lagi gandrung sesuatu yang sedang menjadi mode.

Alhasil, gambaran kiai yang ikhlas, tetapi kolot, pergaulannya luwes, tetapi pendiriannya kaku.

Sudah tentu menjadi kejutan, bagi penulis ini, ketika ia menyanjung SMP-SMA yang sudah tiga tahun berdiri di Pesantren Tebuireng. Ketika penulis ini berkunjung ke rumahnya beberapa bulan lalu, kiai tua ini menyatakan persetujuan atas tegaknya disiplin dan peraturan di kedua sekolah tersebut. Tidak seperti Madrasah Aliyah, katanya, semuanya belum sadar pada peraturan.

Apa kiai tidak keberatan dari sudut pandangan hukum agama atas sistem ko-edukasi? “Tidak,” jawabnya, “karena jelas tujuannya. Larangan bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan ‘kan ditujukan untuk menjaga moralitas dalam pergaulan, untuk menjaga keamanan dalam pergaulan. Jangan sampai ada penyelewengan. Itu saja tujuannya. Lha, kalau mau aman-amanan, mana ada yang lebih aman dari ruang kelas? Apa ada sekolah yang mengajarkan keburukan?” ia balik bertanya.

Di sinilah pentingnya peraturan ditegakkan. Peraturan sekolah menetapkan pergaulan antarsesama siswa harus berlangsung secara tertib dan menjaga tata kesopanan. Kalau peraturan ditegakkan, dari yang menyangkut absensi hingga aturan pergaulan, sudah tentu tercapai tujuan menjaga moralitas dalam sistem ko-edukasi itu.

Bagaimana dengan pakaian anak puteri yang menggunakan *yark*? Berangsur-angsur ditata yang baik, nanti akan diusulkan agar dianjurkan pakai *yark*

maksi, atau dalam istilah kiai kita *rok landung* suatu istilah Belanda-Jawa.

Fleksibilitas kiai “kolot” yang satu ini cukup menarik perhatian, karena ia membawa implikasi bermacam-macam. Yang jelas, tidak benar anggapan kiai-kiai “kolot” tidak memiliki rasionalitas dalam berpendapat, hanya mampu mengoper saja dari literatur fiqh kuno tanpa dikembangkan.

Kiai kolot seperti Kiai Sobari ini memiliki logika dan rasionalitas mereka sendiri, walaupun mungkin tidak sama dengan dasar-dasar berpikir modern. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan keagamaan atas kasus-kasus konkret, sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai kebutuhan massa.

Kalau rasionalitas seperti ini tidak membawa pada pandangan rasional dalam pandangan Kiai Sobari tentang KB, bukankah anak-anaknya nanti yang akan berpikir seperti itu, tanpa harus terputus akar mereka dengan prinsip-prinsip keagamaan yang mereka warisi dari ayah mereka? Bukankah cukup banyak kiai yang menerima gagasan KB, walaupun ayah mereka dahulu tentu tidak setuju?

Rasionalitas Kiai Adlan

Senyum selalu menghiasi wajahnya yang terlihat penuh ketulusan. Senang bergurau secara halus, banyak menjawab secara mengelak, dan senantiasa menunjukkan kerendahan hati dalam bersikap dan bertutur kata.

“Naik apa ke sini tadi, Kiai?” “Wah, saya tadi beli *colt* di depan rumah, sampai di terminal saya jual lagi, terus naik becak ke mari,” jawabnya dengan senyumnya yang khas.

Seorang peneliti datang ke rumahnya di dekat Pesantren Tebuireng, sesuai dengan tugas yang diterimanya dari Leknas dan UGM Yogya. “Dulu belajar apa saja kepada Kiai Hasyim Asy’ari, Kiai?” Jawab sang kiai dengan senyum yang tidak pernah hilang itu: “Hanya kitab *Taqrib* saja”.

Sang peneliti bingung karena teks yang satu ini begitu kecil dan merupakan buku teks dasar saja di pesantren.

“Hanya itu saja Kiai, tidak ada yang lain?” “Ada juga yang lain, malah banyak kitab lain, tetapi saya sudah lupa.” Jawab sang kiai mengelak. Larangan berpamer kepandaian adalah bagian dari kehidupannya.

Sang peneliti membawa kebingungan karena cukup kontras dengan keadaan fisiknya dewasa ini; serban yang tidak pernah tinggal dari bahu, dahi, dan dua tanda hitam akibat lamanya bersujud sembahyang malam selama berpuluh-puluh tahun, serta doa wiridnya yang begitu panjang setiap habis salat. Belum lagi hafalan penuhnya atas al-Qur'an dan kependekarannya dalam majelis-majelis hukum agama. Jauh sekali dari bayangan semula sebagai pemuda kaya yang senang ngebut di zaman "normal!"

Tetapi, yang paling membingungkan adalah pola sikap hidupnya yang penuh pembalikan pendirian, kalau dilihat sepintas lalu saja.

Sebagai murid setia Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Adlan Ali tidak diizinkan memasuki tarekat semasa hidup gurunya tercinta itu. Kecintaannya itu masih melandasi hidupnya sekarang, tetapi mengapakah sepeninggalan sang guru ia justru mengikuti tarekatnya Kiai Ramli Rejoso? Bahkan lebih jauh lagi: kini ia di usia 76 tahun menjadi pemimpin tarekat sendiri, yang lebih kurang berpangkalan di Pesantren Tebuireng. Apa tidak khawatir kwalat dengan Kiai Hasyim, yang dulu begitu tekun berpolemik melawan gerakan-gerakan tarekat yang ada di bumi Jawa? Apakah tidak ada konflik kejiwaan dalam dirinya, akibat pembalikan sikap itu?

Ternyata dalam hal ini sudut pandang lahiriah saja sulit untuk menangkap tindakan yang secara lahiriah itu berbentuk pembalikan sikap. Harus di-

mengerti sebab-sebabnya diambil sikap seperti itu, harus didekati rasionalitas tindakan itu sendiri. Adalah ceroboh untuk begitu saja menilai suatu tindakan sebagai pembalikan sikap diketahui apakah ia benar-benar pembalikan atau bukan.

Dalam kasus Kiai Adlan Ali, ketaatan asas (konsistensi) dalam berpikirlah yang menjadi sebab dari apa yang tampak dari pembalikan sikap itu. Kiai Hasyim dulu menentang ekses-ekses tarekat, bukan tarekatnya. Ia pernah debat dengan Kiai Khalil Rejoso, pendiri Tarekat Naqshabandiyah di sana, karena dituduhnya Kiai Khalil mendakwakan kewalian dirinya.

Sekarang persoalannya sudah lain sekali, begitu mungkin jalan pikiran Kiai Adlan. Orang tidak bergairah menjalankan ibadah agama di luar lingkup ketarekatan. Apakah kita biarkan mereka tidak sembahyang, hanya karena takut ekses-ekses tarekat itu sendiri? Mana yang lebih perlu, mengajak orang agar sembahyang, ataukah meributkan soal ekses-ekses tarekat?

Kalau dipahami jalan pikiran ini, akan menjadi jelas pula mengapa Kiai Adlan dapat mendamaikan antara keterlibatan dirinya dalam gerakan tarekat dan kecintaan (yang menghasilkan ketundukan) dirinya kepada mendiang gurunya, Kiai Hasyim. Ia menerima dan tunduk pada perintahnya Kiai Hasyim, walaupun ketundukan itu tidak hanya pada pengertian literer perintah itu sendiri saja, tetapi justru ketundukan untuk mengembangkannya dalam kasus yang sama sekali berbeda. Ketundukan itu dalam (*inner obedi-*

ence, yang tampak sebagai pengingkaran di luar (*outer obedience*).

Berapa orangkah dari kalangan kita yang sanggup mengikuti perintah dalam penghayatan di dalam seperti itu? Mampukah kita untuk melepaskan diri dari ketundukan luar untuk mengejar ketundukan di dalam, suatu hal yang lebih bersifat pengembangan dan mempunyai nilainya sendiri yang mendasar?

Bukankah kebalikannya yang lebih banyak kita lakukan, yaitu ketundukan di luar dan melawan di dalam? Tanyakan kepada alumnus penataran P4, kalau tidak percaya! Memang menarik untuk mengikuti jalan pikiran Kiai Adlan, dengan rasionalitasnya yang unik itu.

Kiai Razaq yang Terbakar

Kiai Abdul Razaq Makmun adalah profil yang tersendiri di antara “barisan kiai” di kalangan kaum Betawi.

Kalau para kiai lain getol melancarkan serangan gencar pada hal-hal yang modern, kiai dari “golongan Tegalparang” ini justru memakai pendekatan serbaringan. Kalau para kiai lain menunjukkan kata-kata tajam, Kiai Razaq justru tidak pernah menyinggung-nyinggung perbedaan agama. Seperti kasus judi beberapa tahun yang lalu, Kiai Razaq justru jarang menyoroti soal-soal hangat seperti itu.

Tema pembicaraannya, walaupun dibumbui dengan humor segar dan penuh dengan “dalil” ayat al-Qur’an dan hadis Nabi, biasanya hanya berkisar pada pentingnya kerja menuntut ilmu. Tema tunggal ini disampaikannya secara menetap selama sepuluh tahun.

Walaupun dihormati almarhum Kiai Bisri Syansuri sebagai salah satu dari sedikit ulama Betawi yang “mengerti hukum agama secara mendalam”, sedikit sekali diperagakannya kebolehan di bidang fiqh

itu. Paling-paling hanya ketahuan kalau sedang ada musyawarah hukum agama di kalangan Syuriah Nahdlatul Ulama.

Di luar forum terbatas dan periodik seperti itu, yang disampaikannya hanyalah pesan menuntut ilmu bagi kepentingan agama.

Mengapa demikian tekun ia dengan tema tunggalnya itu? Mengapa kiai-kiai lain justru tidak demikian?

Banyak sebab dapat dicari, tetapi yang terpenting tentunya adalah kehidupan kejiwaannya sendiri. Ia berkembang dalam suasana yang memuliakan pencapaian standar pengetahuan agama yang tinggi, bukan hanya sekadar “kiai-kiaian”. Karena kedalaman pengetahuannya ini, ia melihat kekuatan agamanya sendiri.

Pantaslah kalau ia tidak begitu melihat ancaman proses modernisasi. Selama masih ada ulama yang berpengetahuan agama mendalam, yang akan memimpin umat melakukan proses penyaringan atas jalannya modernisasi itu sendiri, tidak usah kita histeris atau panik. Asal anak muda mau mempelajari ilmu-ilmu agama, yang diistilahkannya “mencari ilmu”, selama itu pula akan ada proses seleksi yang baik.

Jawaban atas modernisasi, dalam pandangan Kiai Razaq, adalah anjuran “menuntut ilmu”.

Tata-nilai yang dianutnya masih tergolong apa yang oleh Sharon Shiddiqui dari *Institute of Southeast Asian Studies* sebagai “budaya pesisir”: penghormatan

kepada kaum sayyid, terutama almarhum Habib Ali Kwitang. Watak hidupnya masih serba-tradisional, dalam artian mengikuti amalan-amalan agama yang sudah berumur ratusan tahun tanpa banyak mengalami pergeseran.

Walaupun demikian, rasionalitasnya, yang dibawakan oleh keyakinan penuh pada ilmu-ilmu agama sebagai pengarah kehidupan, membawakan pendekatan tersendiri pada masalah dasar yang dihadapinya dalam kehidupan. Rasionalitas yang tidak mencari argumentasi serba-logis dari ilmu pengetahuan modern, tetapi yang berpangkal pada integritas ilmu-ilmu agama itu sendiri.

Dari sudut pengenalan ini, kita tidak heran ketika akhir-akhir ini terjadi perkembangan menarik dalam pesan-pesan keagamaan yang disampaikannya. Kiai Razaq tidak lagi hanya berpesan tentang pentingnya transmigrasi.

Transmigrasi? Dari kiai tradisional ini? Dari mana ia peroleh gagasan itu? Apakah yang mendorongnya berbicara semangat tentang transmigrasi?

Persoalannya sederhana saja. Di dalam berdialog dengan dirinya sendiri, ditemukannya cara terbaik untuk lebih mematangkan sikap hidup kaum muslimin Betawi. Sikap hidup yang menghasilkan perbaikan kualitas hidup mereka kelak, tetapi terlebih-lebih yang akan mendorong generasi muda untuk “menuntut ilmu” melalui penyediaan sarana sosial-ekonominya.

Bukankah di tempat baru mereka akan mendapatkan perbaikan situasi ekonomi masing-masing? Bukankah akan lebih mudah bagi mereka untuk membiayai pendidikan agama di tempat baru, daripada berjubel di tempat lama dengan sumber-sumber ekonomi yang semakin mengecil?

“Menuntut ilmu” diwajibkan oleh agama. Bukankah prasarana untuk kerja tersebut menjadi wajib, sesuai dengan kaidah *Ma layatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun* (Sesuatu yang menyempurnakan kewajiban berstatus wajib pula)? Transmigrasi menjadi wajib karena ia merupakan persyaratan bagi kewajiban “menuntut ilmu” di kemudian hari. Belum lagi dihitung kepentingannya bagi pembangunan nasional.

“*Aneudah* bentuk suatu yayasan untuk membantu pemerintah dalam soal transmigrasi,” ujarnya dalam gaya khas Betawi pada sebuah penataran muballigh bulan puasa yang lalu. “Sayang enggak inget namenye. Maklum, panjang banget namenye.”

Hadirin tertawa mendengar ucapan terakhir ini. Bagaimana orang dapat lupa pada nama yayasan yang didirikannya sendiri.

“*Entesemue* jangan ketawa dulu. Pikir mateng-mateng pesen *aneini*. Diskusi-in biar lame. Tanggung deh *entesemue* nanti lebih kebakar dari *gesekarang*.”

Begitu yakin Kiai Razaq dengan ajakannya yang baru ini, sehingga ia membuat perkiraan keadaan di masa datang: “Dua puluh *taon* lagi tanggung deh *ente*

Kiai Razaq yang Terbakar

semua bakal bilang Kiai Razaq orangnye jempol.
Sekarang sih belum ketahuan!.”



Ketat Tetapi Longgar

Kiai pantai utara Jawa ini terkenal keras sikapnya, kaku pikirannya, dan ketat dalam perumusan pendirian keagamaannya. Entah di sebelah Barat, seperti di daerah Cirebon, entah pula di Timur.

Keyakinan agama para kiai pesisir itu kokoh, sekokoh batu karang yang sesekali menghiasi lepas pantai mereka yang dangkal. Hukum agama yang mereka rumuskan berwatak tegar, sedikit sekali mempertimbangkan keadaan manusiawi masyarakat di mana mereka hidup.

Tidak heranlah jika Kiai Wahab Sulang dari Rembang sempat membuat heboh di kalangan yang sedemikian tangguh keyakinan dan ketat perumusan hukum agamanya.

Bagaimana tidak heboh, kalau istrinya yang anggota DPRD itu termasuk yang paling asyik dan getol mengikuti acara non-santri di pendopo kabupaten. Sudah fraksinya, FPP, masih campur-baur lagi dengan nyonya-nyonya Golkar dan Kopri dalam acara “maksiat” yang berupa tarian-tarian Jawa gendingan. Bagaimana tidak geger kalau istrinya kian kemari tanpa

“mahram” yang mengawal, sering dalam rombongan yang berisi para laki-laki saja.

Pola tingkah laku “non-santri” seperti itu tidak heran sebenarnya kalau datang dari Kiai Wahab Sulang. Karena memang ia tidak pernah konvensional. Tindakannya sering kali timbul dari spontanitas sendiri saja.

Sewaktu istrinya baru mendapat pembagian sepeda motor (dengan pembayaran kembali secara diangsur, tentunya), kiai kita ini segera menggunakannya. Sebagai akibat, ia menabrak sebuah rumah. Sepeda motor rusak dan ia sendiri luka-luka. Penjelasan kiai: “Habis saya pakai rem kaki.”

“Lho, rem kaki ‘kan memang harus dipakai dalam hal ini, Kiai.”

“Ya, tetapi maksud saya bukan begitu: saya mengerem hanya pakai kaki saja. Karena belum tahu bagaimana dan di mana remnya.”

Menarik untuk dikaji, bagaimana kiai tidak konvensional seperti ini masih diikuti orang. Mengapa ia masih diterima di lingkungan sesama kiai? Mengapa ia tidak diserang dan “disensor” oleh kiai-kiai lain? Mengapa dibiarkan saja ia memberikan pengajian umum, memberikan fatwa hukum agama kepada yang datang memintanya, dan melakukan fungsi ke-kiai-an secara penuh?

Apakah hanya karena ketenarannya sebagai orang “jaduk” yang kebal senjata tajam dan tidak mempan

peluru? Kemampuannya mengobati orang dengan do'anya yang mustajab?

Ternyata tidak demikian persoalannya. Ada sebuah jawaban yang menunjukkan lenturnya hubungan antar-sesama kiai di pedesaan Jawa. Sebabnya terletak pada kesanggupan Kiai Wahab yang eksentrik itu untuk secara minimal mengikuti garis bersama, sedangkan pada saat yang sama mengikuti pola berpikir tidak konvensional itu.

* * *

Dalam forum yang merumuskan hukum agama, Kiai Wahab terkenal sama keras pendiriannya dengan para kiai lainnya. Sama ketat perumusan hukumnya.

Sikap begini terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut dogma keagamaan: ia mengikuti konsensus dalam hal yang sudah ditetapkan dan, dengan demikian, mengikuti pola umum sikap para kiai secara nominal.

Tetapi, sikap di atas tidak dapat membatasi Kiai Wahab Sulang hanya pada pendekatan legal-formal belaka, tanpa mampu mengembangkan sikap adaptif terhadap kebutuhan masa. Dan kehebatan kiai yang ini justru terletak pada kemampuannya mencari landasan keagamaan bagi sikap yang longgar terhadap kebutuhan manusiawi.

Anda butuh transfusi darah, tetapi takut hukum agamanya haram menerima donasi darah orang lain?

Sikap yang salah, menurut Kiai Wahab. Orang Islam harus bertolong-tolongan, bukan? Allah ‘kan berfirman “bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan!”

“Ya, Kiai, memang demikian, tetapi bukankah donor darah menyangkut soal hubungan kekeluargaan dan sebagainya?”

“*Sampeyan* ini tidak ingat firman; “permudahlah oleh kalian, jangan persulit” (*yassiru wa la tu’assiru*)! “Asal tujuannya baik dan untuk menolong manusia lain, apa salahnya?”

Bagi manusia kosmopolitan, sikap seperti ini bukanlah barang baru. Tapi, pentingnya sikap ini baru dapat dirasakan dalam situasi di mana pendidikan non-agama masih dilihat dengan penuh kecurigaan, dan di mana segala sesuatu justru ditinjau dari rumusan legal-formal hukum agama.

Dan justru di sinilah letak nilai penting dari sikap Kiai Wahab tersebut: sikap untuk merumuskan kembali hukum agama dengan mempertimbangkan kebutuhan manusiawi masyarakat. Jadi, sikap untuk meninjau kembali keseluruhan wawasan legal-formal itu sendiri. Bukankah ini titik-tolak pandangan hidup serba-humanistik yang kini begitu dipuja orang?

Tetapi, Kiai Wahab memiliki kelebihan atas semua orang humanistik dan kosmopolitan, yaitu bahwa benih-benih humanistisnya secara konkret dilandaskan pada keyakinan agama dan kebenaran

firman Allah, sedangkan kita justru sering mempertentangkan di antara keduanya. Kelebihan ini harus diakui, lebih-lebih karena ia dimiliki oleh kiai desa yang tidak dapat menggunakan rem sepeda motor.



Kiai Iskandar dan Pak Damin

Kiai Iskandar masih muda walaupun sering dituakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam usia belum tiga puluh tahun sudah jadi “lurah pondok” di Pesantren Lirboyo. Ini tanda kepercayaan almarhum Kiai Marzuki dan Kiai Makhrus kepadanya. Bersekolah SMP Muhammadiyah semasa menjadi santri di pesantren tersebut, sedikit banyak ia menyatukan dalam dirinya dua jenis “budaya santri”: budaya akhlak pribadi serba-tasawuf, yang menjadi “merk” para kiai NU, dan budaya senang bekerja dalam jalur organisasi untuk menangani masalah-masalah kemasyarakatan, yang menjadi “cap”-nya orang Muhammadiyah.

Berkembangnya pola tunjang-menunjang antar-kedua “budaya santri” tersebut tambah diperkuat lagi oleh statusnya sebagai pegawai negeri, *dus* anggota kopri. Ke-kiai-an pesantren harus difungsikan seiring dengan tugasnya sebagai direktur di sebuah sekolah agama negeri, *plus* keterlibatannya sebagai wakil ketua majelis ulama di kabupatennya. Pendekatan manusia-wi yang sarat dengan kepemimpinan yang sanggup menyantuni masyarakat agraris di desanya, harus diimbangi oleh pola hubungan dengan guru-guru negeri yang menjadi anak buahnya.

Akhlak ke-kiai-an yang mampu menyantuni segenap lapisan masyarakat, yang dikembangkan oleh gembelangan yang diterimanya di Pesantren Lirboyo, membawanya juga pada kemampuan mengelola harta masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

Maka, pada usia muda ia terkenal dengan kejujuran finansialnya. Wakaf, infak, dan sadaqah adalah harta masyarakat yang sering diamanatkan kepadanya. Juga titipan uang orang banyak untuk diusahakan, dengan cara menitipkannya kembali kepada para petani dan pengusaha lokal.

Selain fungsi bermacam-macam itu, ia punya fungsi yang unik: menjadi *clearinghouse* bagi informasi soal perjodohan. Soal menghubungkan pihak-pihak yang akan berjodoh adalah spesialisasinya. Ini didukung oleh reputasinya sebagai orang yang berhasil mencarikan jodoh yang sesuai dan serasi. Ini tentu berkat ketajaman penglihatannya akan watak manusia, status sosial masing-masing, dan lain-lain faktor yang harus diperhitungkan dalam soal perjodohan yang sukses.

Sang kiai juga jadi wasit dalam sengketa harta di kalangan masyarakat, ditambah fungsi kerohanian untuk menolong mereka yang menderita di sekitarnya.

Bukan tanpa pengorbanan Kiai Iskandar dapat melakukan fungsi seperti itu dengan penuh.

Ia harus mampu menyesuaikan diri sepenuhnya dengan aspirasi kiai lain di daerahnya. Ia harus mampu

mempelopori penerapan nilai-nilai keagamaan konvensional dalam kehidupan masyarakat.

Ia tidak boleh menyimpang dari “aturan permainan” tersebut. Bila ada orang kawin, ia harus memberikan sambutan standar yang sudah berumur ratusan tahun. Bila ada pengajian, ia harus mencanangkan pentingnya berakhlak konvensional, seperti menganjurkan salat secara tetap, melarang orang berjudi, dan seterusnya.

Di antara nilai yang harus dituntutnya adalah pembagian tugas antara “kita orang santri” dan “mereka yang bukan-santri”. Tidak usah memusuhi, tetapi tidak pula boleh menggauli mereka secara akrab. Tidak boleh menyantuni dalam soal yang berada di luar persamaan sebagai penduduk yang sama-sama tinggal di satu desa.

Di hari lebaran, tidak usah bertandang ke rumahnya. Kalau mereka sakit tidak usah dijenguk. Kalau mereka berpesta, tidak usah datang membantu persiapannya, cukup datang sebagai undangan pada waktunya saja. Dan begitu seterusnya.

Dengan kata lain, Kiai Iskandar harus mengikuti pola hubungan monolitik kaum santri di pedesaan Jawa: kucilkan mereka yang bukan-santri dari pola paguyuban ke-santri-an sejauh mungkin.

Belasan tahun Kiai Iskandar menjalani pola kehidupan seperti ini, hingga secara kebetulan ia menghadapi kejadian yang tidak diduganya sama

sekali. Bulan puasa yang lalu, salah satu tetangga yang baru berpindah ke desa itu, meninggal dunia karena sakit. Pendatang baru itu belum pernah bertandang ke rumah Kiai Iskandar, sehingga sang kiai tidak tahu dengan tepat apa “identitas kultural” sang tetangga. Miskomunikasi wajar dalam kehidupan yang semakin kompleks.

Karena sang tetangga meninggal dunia malam Jumat bulan puasa, secara spontan Kiai Iskandar memasukkannya dalam kategori orang baik, yang kepulangannya ke rahmatullah akan diterima dengan baik di sisi Tuhan. Prasangka baik yang dibawa oleh kepercayaan akan sabda Nabi Muhammad ini mendorong Kiai Iskandar untuk segera memerlukan datang ke rumah tetangga itu.

Kiai Iskandar menjadi heran ketika dilihatnya hanya sedikit orang berada di tempat Pak Damin, tetangga baru yang meninggal dunia. Tidak ada tokoh pengurus jenazah, seperti kebiasaannya. Tidak ada rakyat yang memotong batang bambu, membelah-belahnya untuk dijadikan peralatan mengubur jenazah nanti.

Tanpa kecurigaan apapun, Kiai Iskandar segera “menggerakkan” rakyat sekitar untuk mengurus jenazah Pak Damin, dari memandikan hingga ke upacara penguburan keesokan paginya. Ia memberikan kesaksian jenazah tersebut sebagai orang baik, karena kematian Pak Damin terjadi malam Jumat di bulan puasa. Ketika ia meminta pengokohan orang

banyak atas kesaksiannya itu, mereka menjawab secara bermalas-malasan, tidak antusias, menurut bahasa orang kota.

Kiai Iskandar tidak menyangka jauh-jauh, apa sebab keengganan itu. Ternyata Pak Damin bukan santri. Ia orang kebatinan, alias kejawen. Pak Damin diidentifisir sebagai orang luar yang tidak perlu disantuni, menurut tata-nilai dan pola hubungan serba-monolit di pedesaan.

Segera Kiai Iskandar melancarkan jawabannya sendiri atas kejadian tersebut. Untuk menghilangkan salah pengertian orang banyak, demikian tuturnya.

Di mana-mana ia jelaskan perlunya orang kebatinan seperti Pak Damin juga disantuni kalau meninggal dunia. Orang yang bukan-santri juga harus diperlakukan dengan baik dan terhormat dalam pergaulan hidup, kalau mereka memerlukan santunan.

Kalau kaum santri dapat berbuat begitu, kalau-pun orang bukan-santri tetap pada keadaan semula, anak cucunya toh akan merasakan pentingnya arti santunan tersebut, dan akan melihat kegunaan menjadi orang santri.

Entah karena perhitungan praktis bahwa ia toh dapat menggerakkan orang banyak untuk berbuat demikian, entah karena sudah terlanjur melakukan hal yang sama, Kiai Iskandar lalu mengambil sikap menyimpang dari sikap monolit kaum santri di desanya.

Yang jelas, perubahan sikap yang bersumber pada prasangka baik dan kepercayaan akan “status baik” jenasah yang meninggal dunia malam Jum’at bulan puasa itu telah membawakan pola hubungan baru di desa tersebut.

Ini mungkin tidak disadari sejauh itu oleh Kiai Iskandar sendiri. Bagaimanapun juga, kejadian ini menunjuk pada salah satu landasan kehidupan para kiai: rasionalitas tersendiri yang tumbuh dari kepercayaan keagamaan mereka.

Bersatu dalam Menuntut Ilmu

Kiai Fatah dan Kiai Masduki adalah dua orang di antara sekian kiai yang hidup di Desa Tambakberas. Bersama-sama, kiai-kiai itu menghidupkan kegiatan keagamaan dan mengelola pesantren di desa tersebut, sebagai amanat Kiai Wahab Chasbullah.

Kiai Fatah tinggal di kompleks utama Bahrul Ulum itu, di sebelah timur sungai yang membelah dua desa yang terletak dua kilometer di utara Kota Jombang itu. Kiai Masduki tinggal di sebelah barat sungai.

Kiai Fatah jadi pemimpin formal kompleks utama dengan ratusan santri yang tinggal, termasuk mengelola semua jenis pendidikan di lingkungan tersebut. Kiai Masduki hanya mengurus beberapa belas santri saja, itu pun di waktu mereka tidak bersekolah di kompleks utama.

Kiai Fatah menjadi agamawan penuh, dalam artian tidak memiliki pekerjaan apa pun selain menjadi kiai di pesantrennya. Kiai Masduki adalah petani yang mengerjakan sawahnya sendiri dengan susah payah, dan mengusahakan pekarangan rumah yang ditanaminya dengan tanaman kebun.

Kiai Fatah mengajar di madrasah, menggunakan peralatan sekolah dengan jam pelajaran teratur. *Balaghah* (retorika) adalah mata pelajaran kesayangannya, juga usul fiqh. Lain dari itu, tidak mau ia mengajarkannya di sekolah. Paling-paling di luar jam sekolah, sebagai pengajian *weton* yang diikuti para santri tanpa memandang kelas sekolah masing-masing. Semacam kuliah umum atau *courses* menurut bahasa program purna sarjana di universitas modern.

Kiai Masduki, sebaliknya, tidak mengajar di kelas. Ia mengajar di suraunya sendiri, menunggu santri yang akan mengaji kepadanya. Seperti dokter praktik yang menunggu kedatangan pasien.

Lima kali sehari ia buka praktik. Sehabis salat Subuh pada dini hari, sehabis salat Zuhur di tengah hari, sehabis salat 'Asar di sore hari, sehabis salat Maghrib di senja hari, dan sehabis salat 'Isya di malam hari.

Siklus kehidupan ini tidak mengenal nilai waktu secara modern, tidak dibatasi oleh pagaran waktu yang umum digunakan di luar. Pengajian siang terhenti kalau kereta api ke jurusan Kota Babat melalui Desa Tambakberas. Kalau peluit kereta tidak kunjung terdengar, pengajian tidak selesai secara cepat.

Tiap santri yang mengaji menunggu giliran masing-masing. Kalau tiba gilirannya, akan meletakkan teks yang ingin dipelajarinya di atas meja yang terletak di muka sang kiai. Kiai Masduki akan membaca halaman yang dibuka oleh santri, walaupun teks

itu diletakkan secara terbalik, sang kiai membaca teks itu dari atas, santrinya memberikan catatan di bawah baris yang dibaca.

Habis sebuah subjek dibacakan dan diterangkan, sang kiai beralih kepada santri yang lain. Lagi-lagi seperti dokter yang berpraktik. Kalau dokter tidak menampik pasien yang berpenyakit apapun, Kiai Masduki tidak pernah menolak santri yang membawa kitab teks apapun.

Kiai Fatah pandai berpidato, bahkan termasuk orator yang memikat hati. Berbagai macam ilustrasi sejarah dikemukakan untuk menggambarkan pesan yang disampaikan secara hidup. Banyak lelucon diceritakannya untuk mencegah datangnya kantuk para hadirin, dan banyak hafalan ayat al-Qur'an, hadis, dan syair-syair Arab dilontarkannya untuk meyakinkan orang banyak.

Kiai Masduki, sebaliknya, mungkin tidak pernah berpidato di muka umum seumur hidupnya. Kalau pun “berperan” dalam majelis-majelis keagamaan di muka umum, paling-paling hanya untuk membacakan do'a penutup atau memimpin tahlil. Kiai Fatah sering menggoda dan mempersilakan Kiai Masduki memberikan sambutan. Dan Kiai Masduki akan selamanya menjawab nanti saja, sehabis *sampeyan* memimpin tahlilan. Maklumlah Kiai Fatah sebagai orang yang tidak pernah urut dan runtut kalau memimpin tahlil.

Perbedaan gaya, cara hidup, dan pola pembagian kegiatan di antara keduanya tidak menutupi kenyataan akan persamaan yang mendasar di antara keduanya: keteguhan hati untuk mengabdikan diri pada tugas hidup mengajarkan ilmu-ilmu agama di lingkungan pesantren. Kiai Fatah dalam bahasa kini dapat dikatakan “kiai full timer”, sedangkan Kiai Masduki “kiai part timer” (karena merangkap bertani). Tetapi, keduanya mengkhususkan pengabdian mereka pada upaya “menuntut ilmu”.

Tidak heran kalau keduanya lalu diarahkan jalan pikiran mereka oleh tugas hidup “menuntut ilmu” itu, watak mereka dibentuk oleh kecintaan pada ilmu-ilmu agama, dan sikap hidup mereka sepenuhnya ditentukan oleh kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh ilmu-ilmu agama itu sendiri.

Mereka menjadi orang yang tulus dalam mengarungi lautan hidup tulus pada panggilan hidupnya, tulus kepada orang lain (tidak pernah mengemukakan buruk sangka mereka kepada orang lain), dan tulus pada kebenaran yang datang dari keputusan yang diambil bersama.

Tidak heranlah jika mereka tidak pernah menyerang pihak lain, berusaha sejauh mungkin tidak menyakiti hati golongan lain, dan lebih-lebih lagi bersikap toleran dalam persoalan yang menyangkut kepentingan umum.

Ya, kebersamaan yang datang dari kesamaan tata-nilai dan sikap hidup yang bersumber pada kecintaan mereka pada ilmu-ilmu agama. Mereka menganggap semuanya itu sebagai bagian dari upaya “menuntut ilmu” yang mereka yakini kebenarannya.

Kiai Fatah telah tiada. Kiai Masduki sudah tua renta (tetapi tetap mengajar walaupun tidak lagi ke sawah). Dapatkah mereka wariskan pola kehidupan saling berbeda, tetapi sama-sama semangat “menuntut ilmu” itu?



Baik Belum Tentu Bermanfaat

Tertawa senantiasa dilakukannya sepenuh hati. Raut mukanya seperti menyimpan tawa dalam kadar sangat besar. Sedikit alasan saja sudah cukup membuatnya tergelak-gelak. Sering kali orang sekitarnya terbawa pada suasana penuh tawa seperti itu. Hanya kesopanan bersikap di depan seorang kiai sajalah yang menahan mereka dari turut tertawa tergelak-gelak.

Seperti kecenderungannya yang begitu besar untuk tertawa sepenuh hati itu, Kiai Ali Krapyak memiliki pandangan serba-optimistis tentang kehidupan dan tentang tempatnya sendiri dalam kehidupan itu.

Begitu optimistis ia memandang peranannya dalam kehidupan, sehingga ia sering bagaikan bertindak semau-maunya. Menasehati menteri, menyindir orang lain, dan membuat lelucon bahkan hingga tentang soal-soal keagamaan yang terdalam sekalipun (seperti kepercayaan kepada para wali).

Ia sendiri yang menetapkan hak berbuat demikian, dan ia tidak bertanya kepada orang lain tentang tepat atau tidaknya tindakan seperti itu. Pokoknya ia

yakin tentang penting atau benarnya suatu hal, langsung dilakukannya.

Walaupun bergaul dekat dengan banyak pejabat pemerintahan dari tingkat teras di pusat dan daerah, sering kali ia mengambil sikap melawan dan menyanggah. Kasus RUU Perkawinan pada tahun 1973-1974. Kasus tanda gambar Ka'bah menjelang Pemilu 1977. Kasus aliran kepercayaan dalam SU-MPR yang lalu. Kasus liburan puasa.

Mengapakah kiai yang begitu luas dan bersifat akomodatif dalam pergaulan dapat mengambil sikap “keras” dalam kasus-kasus di atas? Bukankah itu berarti adanya inkonsistensi antara pola umum hidupnya yang serba-akomodatif dan kekerasan kepala dalam beberapa hal?

Jawabannya terletak pada kemampuan Kiai Ali untuk menentukan pilihan antara hal-hal yang esensial agama dan hal-hal yang dianggapnya bukan persoalan utama. Kemampuan untuk melakukan penyesuaian dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan identitas semula yang bersumber pada nilai-nilai keagamaan yang paling dalam.

Ini terbukti dari keseluruhan pola kehidupan kiai yang baik ini. Sebagai kiai yang mendalam pengetahuan agamanya, sebenarnya ia cukup mengikuti sistem pendidikan tradisional yang sudah berjalan begitu lama untuk memperoleh tempat terhormat dalam barisan ulama “tangguh”. Itu tak dilakukannya.

Sebaliknya, ia membuka sekolah agama yang “aneh”: di samping kitab-kitab kuno agama, para santrinya dirangsang untuk membaca literatur baru dari Timur Tengah. Di samping mempelajari gramatika Arab kuno, para santri itu dirangsang untuk mempelajari literatur bahasa kontemporer.

Di samping mendalami hukum agama dari buku-buku fiqh kuno, mereka didorong untuk mendalami juga literatur studi perbandingan dengan hukum-hukum lain yang dianut di Barat dan Timur. “Mengapa Kiai menyuruh mereka membaca buku-bukunya Abduh, apakah tidak khawatir para santri “lepas” dari NU?”

Kiai Ali menjawab dengan tertawanya yang khas: “Kalau membaca buku yang macam-macam nanti akan menjadi NU yang matang”.

“Mengapa Kiai begitu gandrung mengajar di IAIN, mengapa justru tidak membuka sendiri pengajaran agama lanjutan khusus untuk kitab-kitab mazhab Syafi’i?”

Sambil tertawa lagi, Kiai Ali menjawab: “Di IAIN mereka akan memperoleh tambahan pengetahuan di samping kitab-kitab mazhab tersebut”.

Di sini kita bertemu dengan pribadi yang mencari pemecahan pragmatis bagi masalah-masalah keagamaan yang rumit. Pragmatisme yang dihasilkan lalu memiliki perpaduan antara sikap rasionalistis dan keyakinan yang teguh akan kebenaran ajaran agama.

Apa yang harus dipelihara sekuat tenaga dari warisan masa lampau dan apa yang harus diambil dari kehidupan kontemporer bagi kepentingan penyesuaian dengan kebutuhan.

Dalam kerangka seperti inilah dapat dipahami “penafsiran” Kiai Ali ini atas sebuah pendapat Imam Ghazali dalam karya utamanya, *Ihya’*. Imam Ghazali berpendapat, para remaja yang sedang menuntut ilmu harus tirakat, antara lain dengan jalan memakan hanya daun-daunan dan sedikit buah-buahan; dan menjauhi “makanan keras” (*solid food*), seperti nasi jagung dan sebagainya, apalagi daging, ikan, dan ayam. Hanya mencernakan makanan “serba prihatin” seperti itu sangat baik dan bermanfaat untuk mencapai kedalaman ilmu agama. Pendapat seperti ini sudah tentu berlawanan dengan sebutan gizi para remaja yang sedang membutuhkan semua jenis makanan yang akan mengembangkan bentuk fisik tubuh mereka. Ketika ditanya pendapatnya tentang seruan Imam Ghazali untuk melakukan tirakat *ngowot* seperti di atas, jawab Kiai Ali adalah: “baik, tetapi belum tentu bermanfaat”.

Kemampuan memberikan klasifikasi berdasarkan kategorisasi yang komplek adalah kunci dari kemampuan adaptasi yang dilakukan Kiai Ali Krapyak ini. Mengakui kebaikan pendapat yang dirumuskan di masa lalu, sambil mencari manfaat yang baru, adalah salah satu bentuk adaptasi ini.

Tanpa tercabut dari akar masa lalunya, adaptasi Kiai Ali cukup dinamis, bukan?

Tokoh Kiai Syukri

Pantas kalau ia dapat “tingkat nasional” dalam forum sesama ulama. Ia cerdas dan teliti. Betapa tidak cerdas, di tiap forum ia meminta kesempatan bicara terakhir. “Apa masih ada waktu untuk saya?,” adalah “merk dagang”-nya yang sudah diketahui semua orang, diucapkan di kala pembicaraan sudah akan diakhiri.

Tetapi, ada sesuatu di balik “kebiasaan” yang disengaja itu, yaitu meluruskan lagi pembicaraan dari kecenderungan untuk menjadi terlalu sempit, terlalu berpegang pada penafsiran harfiah saja tanpa memasukkan pertimbangan situasi konkret dalam kehidupan. Misalnya, puitisasi al-Qur’an. Apa pendapat kiai. “Asal dimaksudkan penyajian ayat-ayat suci dengan susunan kalimat indah tanpa mengubah inti pesannya, ya baik saja ‘kan?” Banyak persoalan di-dekatinya dengan cara ini.

Kiai Syukri yang sudah tua, tapi masih tetap parlente, ternyata menimbang kearifannya sendiri dalam menggunakan keyakinan agamanya sebagai panduan hidup.

Sejumlah orang NU dan Muhammadiyah secara bergurau memperdebatkan soal “hadiah” membacakan surat Al-Fatihah kepada arwah yang sudah mati. Sampaikah “kiriman” bacaan itu ke alamat yang dituju, seperti halnya *Elthæ* dalam kehidupan dunia? Apakah dasar pendapat yang diikuti masing-masing?

Yang dari Muhammadiyah tidak melihat “dalil yang dapat dipegangi” dari al-Qur’an ataupun hadis Nabi Muhammad untuk menunjang kemungkinan kiriman *via* “*Elthæ* akhirat” sampai ke tujuan di alam sana.

Yang NU memegang pendapat para ulama mazhab yang empat, yang menerima kemungkinan seperti itu.

Bagaimana Kiai Syukri? Semua mata memandang penuh harap kepada kiai metropolitan yang menjadi *gdfathæ*-nya sekelompok “mafia intelektual” dari sebuah daerah di selatan Jawa Tengah ini. Ternyata tidak meleset harapan mereka. Kata kiai, “Hadiah Fatihah tidak sampai ke alamatnya menurut Imam Syafi’i. Ia sampai menurut ketiga imam mazhab lainnya. Kita ikuti suara mayoritas sajalah.”

Semua lega. Yang dari Muhammadiyah merasa aman karena pendapat mereka juga sejalan dengan pendapat imam pendiri dari mazhab yang paling banyak diikuti di Indonesia. Yang dari NU lega karena masih bisa mengirimkan “hadiah ulang tahun (kematian)” yang mereka warisi dari para kiai zaman dahulu.

Sudah tentu kirimannya tidak segera sampai secepat pos kilat khusus, karena tidak didukung oleh Imam Syafi'i, tetapi mereka toh sudah biasa dengan pola *alon-alon asal kelakon*?

Mencari titik-temu optimal antara pandangan yang saling bertentangan dan jalan yang menuju pada perbedaan pendapat di kalangan ulama di masa lalu adalah spesialisasi Kiai Syukri.

Ini adalah “ideologi” yang dalam lingkungan para kiai dikenal sebagai sikap *fihī qaulani* (dalam masalah ini ada dua pendapat), yang menyerahkan kepada umat untuk mengambil pilihan masing-masing di antara dua spektrum pendapat yang saling bertentangan. Umat toh sudah dewasa, kalau dibawa alasan masing-masing pendapat, mereka akan lakukan pilihan secara dewasa. Kalaupun berbeda dengan orang lain dalam hal itu, akan dilakukan tanpa sikap a priori dan sejenisnya.

Kunci dari sikap ini adalah keinginan sangat kuat untuk mencari apa yang terbaik bagi manusia, tetapi melalui pertimbangan manusiawi pula. Dalam bahasa fiqh, kecenderungan ini dinamai “mengutamakan kemaslahatan memang perlu, tetapi mencegah kerusakan jauh lebih penting lagi” (*dar'ul mafasīd aula min jalbil masālih*).

Berapakah di antara kita yang dapat mencapai kearifan demikian, jika dihadapkan pada nilai normatif agama kita masing-masing?



Sang Kiai dan Keyakinannya

Kiai Ali murah senyum. Kiai yang menjadi anggota DPR mewakili sebuah daerah di Jawa ini jarang mengeluarkan suara, meskipun itu tentu tidak ada hubungannya dengan watak hidup lembaga perwakilan saat ini.

Gerak-geriknya halus, tegur sapaanya ramah, suaranya tidak keras, dan selalu lebih banyak mendengarkan ucapan orang daripada berucap sendiri. Tingkah lakunya merendah, sesuai dengan akhlak yang dirumuskan dalam kitab-kitab kuno. Mungkin jarang makan di luar, jajan di restoran, dan sebagainya, karena menurut kitab *Ta'limul Muta'allim* makanan seperti itu kurang berkahnya.

Tetapi, tanda lahiriah yang berupa senyumannya yang khas, yang paling tampak dalam pergaulan. Mendengar pujian orang lain, ia hanya tersenyum mungkin heran mengapa sampai begitu jauh pujian diberikan bagi tindakan atau sifat yang dianggapnya sendiri hal yang biasa.

Mendengarkan argumentasi yang bertele-tele dalam rapat fraksi ataupun kelompok, ia juga ter-

senyum saja. Mungkin geli mendengarkan alasan yang tidak masuk akal yang sering diajukan, kalau tidak malahan alasan kekanak-kanakan.

Bahkan mendengarkan kritik pun Kiai Ali selalu tersenyum: hormatilah pendapat yang berbeda dengan pendirianmu. Begitu kata kitab-kitab kuno tentang tata-cara berdebat (*adabul munadzarah*).

Begitu rendah hati dalam bersikap dan begitu lemah lembut dalam berkomunikasi. Yang terjadi adalah kebalikan dari harapan para penulis kuno yang begitu getol menganjurkan sifat keksatriaan dan kebijaksanaan seperti itu. Bukannya penghormatan dan toleransi yang didapatkannya dari orang lain, melainkan penghormatan di mulut dan sodokan di pinggul yang diperoleh.

Alhasil, profil dari tragisnya wibawa moral yang tidak dilayani orang lain. Dianggap lemah dalam pendirian karena terlalu banyak memberikan kesempatan kepada pihak lain. Dikira tidak tegas karena tidak mau memberikan keputusan cepat-cepat. Dituduh tidak memiliki kepemimpinan karena tidak “keras” dan berani.

Alhasil, tidak memenuhi citra orang dinamis yang penuh inisiatif dan memiliki dorongan untuk mencapai sesuatu (*need of achievement*) dalam hidup ini. Pantas tidak berjiwa wiraswasta, maklum kiai!

Yang sering dilupakan adalah sebuah aspek penting dari kehadirannya, yaitu kemampuannya

mengajukan penunjang dari pandangan keagamaan atas berbagai hal yang merupakan pemikiran atau gagasan rintisan. Banyak hal yang tadinya tidak diperkenankan oleh agama, ternyata memiliki dimensi kompleks yang tadinya tidak dianggap bersangkut-paut dengan pandangan agama, ternyata ada landasan keagamaannya juga. Banyak masalah yang tadinya dikira tidak patut dikemukakan kepada kalangan kiai, ternyata ditunjukkannya sudah dirembuk para ulama sejak berabad-abad yang lalu.

Penulis sendiri tercengang ketika kiai yang satu ini memaparkan hubungan agama dengan strategi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pokok, itu *basic need strategy* yang sekarang menjadi benderanya kaum membangun dari orientasi politik berlain-lainan. Di kitab *Fathul Mu'in*, ada masalah itu, kata Kiai Ali. Coba lihat di bagian “Jihad” yang pengertiannya bukan seperti disangka orang selama ini. Jihad adalah perang suci secara militer menurut alasan keagamaan itu kalau diserang. Tetapi, jihad yang lain juga kewajiban fakultatif (*fardhu kifayah*): menyebarkan ajaran agama, membuktikan kebenaran dan ke-Esa-an Allah, juga menyediakan kebutuhan pokok manusia, itu semua adalah jihad.

“Bagaimana mungkin menyediakan kebutuhan pokok dianggap jihad, Kiai?” “Karena memang begitu perumusannya,” jawab Kiai Ali. Coba lihat rumusannya: menjaga dari kerusakan mereka yang dilindungi Islam. Bagaimana mungkin dijaga dari kerusakan,

kalau tidak dipenuhi kebutuhan pokoknya? Karena itu, jangan heran kalau *sarrah* (komentar) *Fathul Mu'in*, judulnya *I'annah*, merumuskan kewajiban jihad yang satu ini sebagai berikut: menyediakan makanan utama (*qut*) sebanyak 0,6 kg beras sehari per orang untuk kawasan kita di sini, pakaian dua stel satu tahun, tempat tinggal yang aman dari gangguan, dan biaya pengobatan. Lalu apa namanya rumus begini ini, kalau bukan kebutuhan pokok?

Ditanya tentang sterilisasi, aborsi, dan masalah-masalah “gawat” sebangsa itu, Kiai Ali tidak langsung menjawab boleh atau tidaknya. Harus ada kriteria dahulu, yang dalam bahasa kitabnya syarat-masyrut-nya. Dilihat kesesuaiannya dahulu antara tujuan dan metode yang digunakan untuk mencapainya, atau menurut kitab kuning, *ghayah wal was'il*-nya. Harus dihadapkan dulu pada kenyataan situasional (*waqi'ah*)-nya, sehingga kita tahu tepat apa yang menjadi kehendak kita (*gharat*) dalam sesuatu persoalan. Tidak mudah, bukan?

Kalau dilihat dari sudut pengamatan ini, jelas bahwa Kiai Ali bukanlah orang yang semudah diperkirakan seperti semula. Murahnyanya senyum yang menghiasi bibir tidak berarti ketololan untuk menyatakan pendapat tanpa mengkaji terlebih dahulu persoalannya secara mendalam. Kecenderungan untuk berlama-lama mengambil keputusan bukanlah sesuatu yang tidak direncanakan, melainkan untuk menghadapkan persoalan secara situasional pada pendapat

ulama di masa lalu, seperti yang tercantum di kitab-kitab kuno.

Keengganannya untuk memberikan “ketegasan” dalam sesuatu persoalan adalah hasil dari pengetahuan yang mendalam tentang kekurangan yang ada pada berbagai alternatif yang dihadapkan satu pada yang lain, sudah tentu dengan tujuan mencari pendapat akhir yang sanggup menutupi semua kekurangan tersebut.

Dengan demikian, apa yang secara lahiriahnya tampak berbagai sikap ragu, sebenarnya adalah “pengarahan” orang lain untuk berpikir lebih lengkap dan menyadari kompleksitas persoalan. Apa yang tampak sebagai “kurangnya kepemimpinan” sebenarnya adalah pertanggungjawaban keberanian untuk mengambil sikap akhir yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita, dan yang memiliki landasan keagamaan yang kuat dalam arti sebenar-benarnya.

Tidak heranlah kalau orang yang tampaknya lemah-lembut, mengalah saja kepada orang lain, dan tidak pernah memaksakan pendirian kepada orang lain ini, sebenarnya juga orang yang berpendirian teguh kalau sudah sampai pada kesimpulan. Tidak beranjak dari pendirian, tidak bergerak juga oleh gangguan, karena ia sampai pada kesimpulan melalui proses dan sangat kompleks.

Apa yang diperoleh, dimiliki, dan kemudian diperintahkan mati-matian bukan lagi hanya sebuah

Kiai Nyentrik Membela Pemerintah

kesimpulan tentang suatu persoalan, melainkan telah menyadari sebuah pendapat yang dianggap paling benar. Ia sampai pada keyakinan.

Dunia Nyata Kiai Zainal

Wajahnya mencerminkan kekerasan hati, kesan yang timbul dari tekukan rahangnya yang tampak sangat nyata. Mirip wajah Jack Palance yang sedang menggertakkan gigi menghadapi Alan Ladd dalam film *Shane* dari masa dua puluhan tahun yang lalu.

Bahkan ada sedikit kesan kebengisan pada wajahnya itu, tetapi yang bercampur dengan ketampanan yang masih tersisa dari masa mudanya.

Wajah keren dari masa muda itu kini membayangkan kewibawaan di masa tua. Tindak-tanduknya (*deleg* kata orang Jawa) mencerminkan juga hati yang penuh ketetapan pendirian, ucapannya menunjukkan keyakinan pendapat, dan caranya mengemukakan pendiriannya juga lugas penuh kepercayaan kepada diri sendiri. Bagaikan eksekutif dinamis masa kini yang ternyata tidak memerlukan *Brisk* dan tidak butuh *Supradin* serta berbagai jenis *deodorant* untuk menjaga kepercayaan diri itu.

Penampilan bagaikan eksekutif ternyata hanya terhenti pada raut wajah dan kesan yang ditimbulkannya belaka, karena Kiai Zainal Abidin Usman

membawa penampilan lain pada sisi tubuhnya: kain sarung polekat yang sudah berumur lama, baju panjang abu-abu dengan sebuah kancing yang hampir lepas, sandal plastik yang begitu murah harganya sehingga tidak akan dicuri orang dari halaman masjid atau langgar, dan seterusnya. Pendeknya, penampilan utuh dari seorang kiai “di tingkat lokal.”

Semua manifestasi lahiriah di atas merupakan hasil dari hidup Kiai Zainal yang penuh kesukaran. Harus mengikuti pola belajar yang penuh disiplin dan sanksi fisik (termasuk dilecut) kalau tidak menunjukkan “jatah” hafalan yang sudah ditetapkan sang guru sejak usia sangat muda, enam tahun. Tidak diperkenankan menikmati masa muda yang penuh dengan kesenangan inderawi, tetapi harus mengikuti pola hidup yang diselaraskan dengan hukum-hukum fiqh dan tata-cara belajar (*adabut ta'allum*) yang diletakkan kitab-kitab kuno agama.

Lebih jauh lagi, ia kemudian harus belajar lama di Makah: jauh dari sanak saudara, sering dihadapkan dengan kekurangan belanja “kebutuhan pokok”, dan harus banyak menjalani tirakat untuk memperoleh ilmu-ilmu agama yang diharapkan.

Tidak heran jika seandainya Kiai Zainal kemudian mengembangkan kepribadian yang “berlajur tunggal”, di mana dominasi hukum agama dan bentuknya yang paling kaku dan harfiah atas pandangan hidupnya. Orang tidak akan tercengang kalau Kiai Zainal kemudian menumbuhkan sikap untuk me-

nerapkan hukum agama secara apa adanya, secara apa yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh kuno. Bukankah semua kiai yang berpola pendidikan dan kemudian pola hidup seperti Kiai Zainal juga berbuat demikian? Pantaslah kalau Kiai Zainal juga diperkirakan akan mengikuti “jalur umum ke-kiai-an” seperti itu.

Ternyata tidak demikian kenyataannya. Kiai Zainal ternyata menumbuhkan pola berpikir yang lain, mengembangkan pandangan hidup dari “jalur umum” di atas. Ia mengikuti “jalur umum” hanya pada pola hidup lahiriahnya sebagai kiai belaka, seperti digambarkan pada penampilan fisik di atas.

Ia ternyata melakukan dialog dengan kenyataan-kenyataan hidup yang dihadapinya, yang sering kali jauh berbeda dari kondisi ideal yang melahirkan hukum-hukum agama yang dikodifikasikan dalam kitab-kitab fiqh kuno. Ia melakukan peninjauan kembali atas hukum-hukum agama itu, walaupun dengan caranya sendiri dan melalui pendekatan persoalan yang dirumuskannya sendiri.

Perbedaan dari “jalur umum ke-kiai-an” itu tampak nyata dalam sebuah forum penataran mubaligh dan khatib baru-baru ini, ketika berlangsung debat tentang penyelenggaraan zakat. Kalau zakat ingin diterapkan secara organisatoris dan dikembangkan melalui perluasan jenis-jenis “wajib zakat” sehingga meliputi upah, honorarium, dan gaji tetap dari bermacam-macam profesi, tentu ada kesulitan.

Mazhab-mazhab fiqh sudah menentukan kategori kewajiban zakat hanya jatuh pada keuntungan berdagang, hasil panen tanaman utama (padi dan sebagainya), harta benda tetap, dan logam mulia emas dan perak. Lainnya tidak terkena zakat. Lalu, bagaimana mungkin gaji tetap, honorarium, dan upah dikenakan zakat?

Belum lagi pelaksanaannya, yang dikehendaki sementara pihak harus diorganisasi secara efisien dan administratif. Diberikannya pun juga harus dalam bentuk tidak melulu konsumtif, tetapi dalam bentuk pinjaman dan pemberian alat. Belum lagi kalau dijadikan biaya penataran dan latihan-latihan keterampilan. Apakah tidak menyalahi ajaran-ajaran mazhab-mazhab fiqh?

“Persoalannya bukan demikian,” kata Kiai Zainal berapi-api. “Apa yang dirumuskan kitab-kitab fiqh itu ‘kan hanya dalam negara Islam saja dapat diterapkan sepenuhnya! Di zaman Rasulullah, ada sanksi kalau orang tidak menyerahkan zakat karena yang dipergunakan adalah perundang-undangan Islam secara total. Jadi tidak perlu ada panitia zakat dan lain-lain kelengkapan administratif lagi. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masing-masing warga negara, jadi tidak usah kita berpayah-payah mencari dana untuk melatih orang bekerja atau memberikan modal kerja kepadanya.”

Tetapi, kita kan tidak hidup di dalam negara Islam, karena itu kondisi yang dihadapi pula berlainan.

Kalau tidak ada sanksi otomatis bagi orang yang enggan menyerahkan zakat, apakah justru tidak diperlukan panitia zakat yang akan menyelenggarakan? Kalau kaum muslim masih lemah ekonominya, apakah seluruh perolehan zakat harus dihabiskan sekaligus secara konsumtif dan tidak digunakan sebagian untuk kepentingan produktif? Kalau kita ingin mengembangkan zakat itu sendiri secara kuantitatif, apakah justru tidak perlu diciptakan wajib zakat baru?

Ternyata di balik bentuk lahiriah yang kuno, Kiai Zainal memiliki daya tanggap yang cukup relevan dengan kebutuhan masa dan keadaan umatnya. Patutlah kalau ia dianggap berorientasi pada dunia nyata. Tetapi, patut juga dipertanyakan anggapan bahwa ia menyimpang dari “jalur umum ke-kiai-an” dalam orientasinya pada dunia nyata ini. Mengingat bahwa ia dibenarkan dan tidak ditentang oleh kiai-kiai lain, apakah bukan sebaliknya yang terjadi?

Bukan tidak mungkin bahwa justru orientasi “jalur umum ke-kiai-an” memang ditunjukkan pada dunia nyata, di kala mereka harus melakukan peninjauan terhadap hukum-hukum agama yang ada dalam kitab-kitab fiqh kuno.



Ustadz yang Hidup dalam Dua Dunia

Hidup dalam dua dunia umumnya mempunyai konotasi yang tidak baik; ada yang disembunyikan dari dunia yang satu terhadap dunia yang lain. Bagaimana beristri lebih dari satu: kepada istri tua tidak mau mengaku datang dari rumah istri kedua, begitu juga sebaliknya.

Tetapi, ternyata konotasi tidak baik bukan pada tempatnya diletakkan pada kehidupan dua dunianya Ustadz Razak Khaidir dari Tegalparang.

Orang Betawi memberi nama bermacam-macam kepada kaum agamawan mereka. Yang masih belum sepenuhnya diterima sebagai kiai, tetapi telah menunjukkan potensi kuat untuk itu, dinamai ustadz (kalau ikut dialek Arab-Mesir). Yang telah mapan diberi nama mu'allim. Sekarang datang gelar baru, yang diambil dari budaya Jawa: kiai. Yang dari keturunan Arab dan dianggap masih berhubungan darah dengan Nabi, dinamai habib, sayyid, syarif, dan seterusnya.

Tetapi, semuanya itu masuk ke dalam kategori tinggi sebagai *gru kite* Istilah umum yang menunjukkan tingginya status sosial mereka dalam masyarakat tradisional Betawi.

Ustadz Razak mengikuti pola umum pendidikan untuk menjadi agamawan di wilayah Jakarta Selatan: mengaji al-Qur'an di surau kepada seorang ustadz sewaktu kecil, dilanjutkan belajar di sekolah agama, untuk diakhiri belajar di "tanah Arab." Mula-mula sebagai "mukimin" di Makah selama bertahun-tahun, kemudian dilanjutkan juga di Mesir sampai pulang ke Tanah Air pada 1967.

Sekembalinya dari menuntut ilmu di rantau orang, ia kembali mengikuti pola umum untuk menempatkan diri di barisan ulama Betawi: membantu mengajar di madrasah, untuk disambung dengan memberikan pengajian di luar kepada rakyat awam, dan akhirnya hanya sibuk dengan pengajian-tanpa mampu lagi mengajar di sekolah.

Pengajian di luar, di lingkungan majelis ta'lim yang tersebar di seluruh kawasan tradisional kaum Betawi, mula-mula dilakukan dengan susah payah. Keluar-masuk di perkampungan terpencil tanpa jalan beraspal, berjalan kaki di lumpur yang tidak dapat dimasuki kendaraan. Mengajarnya pun hanya kepada kelompok-kelompok pengajian yang kecil. Kemudian "nasib"-nya membaik. Pengajian bertambah banyak, dan tersebarnya pun di masjid-masjid strategis. Di tambah lagi akhirnya menjadi dosen IKIP, sudah tentu di bidang keagamaan dan sastra Arab.

Kini sudah ~~kean idupnye~~ kalau meminjam istilah orang Betawi: rumah cukup besar, mobil Corona tahun akhir-akhir, dan memiliki “merk dagang” berbentuk jas putih dan serban yang berwarna putih kalau berangkat ke pengajian. Acara sudah padat, tenggorokan sudah kering tidak mampu melayani kehendak orang banyak. Statusnya mudah diterima di kalangan ulama lain.

Alhasil, gambaran konvensional dari pemunculan ~~sorang~~ *guru kita* yang masih muda.

Tetapi, ternyata ada unsur lain yang membuatnya tidak konvensional. Kalau calon-calon mu'allim lain masih ribut dengan masalah-masalah konvensional seperti urusan judi, menentang rambut gondrong, ribut mempertahankan *satusquo* suasana moral lama, maka ustadz yang juga *guru kite* ini justru membawakan pesan-pesan yang memandang jauh ke depan.

Ia mempersoalkan beberapa masalah yang sebenarnya cukup mendasar dan disampaikannya dengan gaya orang Betawi pula—gaya santri yang khas dan penuh ilustrasi kejadian sehari-hari yang diselingi dengan rangkaian “dalil” berupa ayat al-Qur'an, hadis Nabi, dan mutiara hikmah dari para ulama terdahulu. Pendapat sendiri hanya dikemukakan sebagai tambahan atas pendapat ulama kuno—sama sekali tidak menyanggah atau menyangkal. Tidak heranlah jika sedikit sekali terjadi penolakan atau kehebohan di sekitar pernyataannya.

Misalnya, perkara naik haji. Syarat cukupnya kemampuan ekonomi sebelum memutuskan pergi ke Makah menunaikan ibadah haji dikaitkannya dengan hikayat ahli hadis Abdullah ibnu Mubarak.

Sebagai ketua rombongan kafilah haji dari negerinya, Abdullah ibnu Mubarak menjumpai perempuan melarat yang menyuapi anaknya dengan daging bangkai. Ketika ditanya apakah tidak mengerti haram hukumnya memakan daging bangkai, perempuan itu menjawab bahwa ia mengerti, tapi ia terpaksa. Tidak ada makanan lain.

Sang ahli hadis lalu memerintahkan kepada seluruh rombongan untuk membatalkan perjalanan haji, menyerahkan perbekalan mereka kepada perempuan itu, dan kembali pulang. “Tidak wajib haji,” katanya, “selagi masih ada yang melarat.” Ucapan ahli hadis itu dikiaskan oleh ustadz kita ini pada lebih wajibnya memelihara lembaga pendidikan (yang akan menghilangkan kemelaratan) daripada kewajiban berhaji dua kali dan seterusnya.

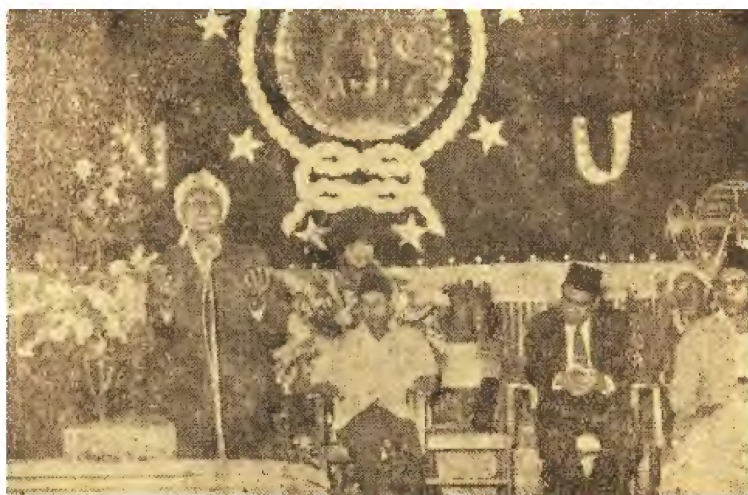
“Dunia ini persiapan untuk kehidupan akhirat kelak,” kata sang ustadz ketika mengaji di Ciganjur. “Kehidupan akhirat sangat tergantung pada kualitas hidup di dunia: kalau bodoh, melarat, dan terbelakang tidak banyak yang dapat diperbuat di dunia ini untuk kepentingan akhirat kelak. Kalau tidak kuat ekonominya tidak mungkin kuat menunaikan ibadah haji, padahal ibadah haji adalah persiapan lebih sempurna lagi untuk kepentingan kehidupan akhirat itu. Ke-

hidupan bahagia di akhirat berkaitan erat dengan kebahagiaan hidup di dunia pula, karena kebahagiaan dunia adalah bagian dari kehidupan akhirat.”

Menarik sekali untuk dikaji lebih jauh pandangan seperti ini: membedakan hidup di dunia dari hidup di akhirat, tapi meletakkan keduanya dalam jalur dan kadar yang sama. “Ada persambungan di antara keduanya,” kata sang ustadz. Kesenambungan, kata favoritnya. Kontinuitas, kata kamus antropologi. Alhasil, “manunggalnya” dunia dan akhirat.

Bukankah cukup baik untuk hidup di dunia seperti yang dilakukan Ustadz Razak ini, bukan? Mengapa kita masih berkeras juga untuk terlalu memisahkan keduanya? Mengapa harus dipertentangkan, padahal saling melengkapi? Mengapa takut dituduh Calvinis, kalau semuanya bersumber dari ajaran agama sendiri?

Ustadz Razak, seumur hidupnya mungkin belum pernah mendengar nama Calvin, dan sepanjang umurnya hanya mengurus pandangan orang Islam saja.



Bila Kiai Berdebat

Banyak kiai memiliki sifat aneh, tetapi yang paling sering didapati adalah sikap egosentris mereka. Mungkin ini adalah kompensasi kejiwaan untuk mengimbangi keharusan berpola hidup serba-konformistis dengan sesama kiai. Juga untuk mengimbangi “larutnya kepribadian” dalam tugas pelayanan mereka yang begitu total pada kehidupan masyarakat.

Taruhlah ini semacam “kemewahan” sikap dalam deretan mendatar pola hidup mereka sendiri: mengajar, beribadah ritual, konsultasi kepada masyarakat, memimpin beberapa jenis upacara keagamaan yang berdimensi sosial (kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian), dan sebagainya.

Justru dalam forum musyawarah hukum agama antarsesama kiai terletak “katup pelepas” untuk menunjukkan arti diri mereka dalam rutinitas kehidupan serba-datar tersebut. Egosentrisme mereka lalu muncul dalam bentuknya yang paling sedikit berakibat negatif. Memang cukup banyak yang memeragakan eksentrisitas watak hanya untuk sekadar tampak aneh saja, sering dirupakan secara konkret dalam bentuk pembicaraan berkepanjangan tentang definisi suatu

hal tanpa mampu mencari kerangka sosial yang lebih sesuai dengan kebutuhan hidup masa kini. Seolah-olah dominasi pemikiran skolastik menutupi munculnya kesadaran sosial yang sedang mencari jalannya sendiri memasuki lingkup pemikiran keagamaan.

Di luar forum musyawarah hukum agama, sedikit sekali tampak perbedaan pendirian dan pendekatan di antara semua kiai itu, karena fungsi ritual yang mereka lakukan kurang lebih dalam pola yang hampir bersamaan. Hanya dalam fungsi mendidik masyarakat melalui dakwah moral, para kiai telah menunjukkan perbedaan cara berpikir. Ada yang menekankan pesan-pesan mereka pada penguatan nilai-nilai moral melalui penolakan atas segala yang bercap modern, tetapi cukup hanya pula yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah dasar dalam kehidupan masyarakat, seperti penumbuhan toleransi dan pengembangan sikap perhitungan (*rechenhaftig*), kalau meminjam istilahnya Jan Romein)

Dalam musyawarah hukum agama yang berlangsung ribuan kali banyaknya di seluruh penjuru Tanah Air setiap tahunnya, berlangsung perdebatan sengit di antara mereka yang hanya berkepentingan untuk membatasi diri pada rumusan-rumusan harfiah yang sesuai dengan landasan berpikir skolastisisme itu sendiri dalam perkembangan sosial berlangsung cepat. Perdebatan antara mereka yang tidak setuju, yang dapat menerima pemindahan kuburan untuk membuat jalan, dan yang tidak dapat menerimanya, serta seribu kasus lainnya.

Variasi sangat besar tampak dalam argumentasi yang digunakan dalam forum-forum tersebut untuk menunjukkan pendapat yang saling berbeda itu. Kaidah yang digunakan adalah aplikasi kaidah yang digunakan atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan. Tidak kurang juga argumentasi murahan digunakan, seperti ucapan almarhum Kiai Wahab Chasbullah kepada almarhum Kiai Abdul Jalil Kudus ketika membahas validitas DPR-GR dari sudut hukum agama dua puluh tahun yang lampau. “Kitab yang *smpetan* gunakan ‘kan cuma catatan Kudus, kalau kitab yang menunjukkan pendapat saya ini cetakan luar negeri.”

Ada sesuatu yang lebih berharga yang sebenarnya tersimpan dalam mengemukakan argumentasi langsung seperti itu. Keinginan untuk memasukkan unsur-unsur kehidupan aktual ke dalam proses perumusan pendapat agama atas sesuatu persoalan. Keinginan agar ada kriteria, betapa halus dan kecilnya sekalipun, dalam penyusunan postulat-postulat (*faradhiyat*) logika agama.

Tidak heranlah jika upaya seperti itu pernah membawa pada suatu kejadian yang berakibat positif, walaupun menggelikan.

Masalahnya menyangkut diktum mazhab Syafi’i tentang larangan menyelenggarakan dua rombongan sembahyang Jum’at di kampung yang sama. Di Kota Jember, timbul persoalan dengan diktum ini, tatkala guru agama sebuah SMP yang berdekatan dengan Masjid Agung bermaksud menyelenggarakan sembah-

yang Jum'at sebagai peragaan praktik di sekolah tersebut.

Para kiai pun segera ribut, terlibat dalam perdebatan antara yang membolehkan dan yang tidak memperkenankan. Perdebatan segera memasuki definisi kampung, yang dalam bahasa arab kuno disebut *balad*, dan aplikasinya bagi masa modern dengan pemisahan wilayah secara administratif. Kelurahankah, atau pendudukhan?

Dalam suasana demikian, Kiai Rahmat mengemukakan pendapat yang “nyentrik” juga: “Boleh saja dilakukan. Antara SMP dan Masjid Agung ‘kan sudah berlainan kampung, tidak sama *balad*-nya. Bukankah RK-nya berlainan?”

Kiai Dollar Berdakwah

Gerak-geriknya memang mirip perempuan. Serba-luwes, termasuk caranya berbicara dan tertawa yang tampak seakan-akan manja. Belum lagi kegemarannya memukulkan tangan kepada orang lain yang diajaknya berbicara untuk menekankan suatu ungkapan yang juga sangat luwes, Ah masak begitu, Mas!

Gaya keperempuanan itu lebih-lebih terlihat dalam ketelitiannya memilih barang dan kepandaiannya untuk tawar-menawar dalam apa pun, dengan menunjukkan hal-hal kecil sebagai poin untuk tawarannya sendiri.

Terakhir, kepandaiannya memasak yang sudah legendaris: sewaktu menjadi mahasiswa Universitas Al-Azhar di Kairo, ia adalah sandaran kaum ibu-ibu Kedutaan Besar RI dalam keperluan masak-memasak dan hidangan untuk resepsi dan sebagainya.

Pantaslah ia sering diseloroхи dengan panggilan “tante”.

Penampilan itu ternyata bukan datang dari penampilan seorang eks. laki-laki yang kemudian menjadi perempuan “penuh” dengan cara berganti kelamin,

seperti Vivian Rubianti beberapa tahun lalu. Ia muncul dari seseorang kiai yang memiliki ilmu agama yang cukup dalam dan lama sekali hidup di lingkungan pesantren. Sejak saya kanak-kanak, ia sudah bergumul dengan kitab-kitab kuno keagamaan, yang sejak awal masa pertumbuhan sudah terikat dengan norma-norma keagamaan dengan nilainya yang menetap. Sebagai murid Kiai Idris selama bertahun-tahun di Tebuireng semasa usia belasan tahun, ia telah terlatih dalam ilmu-ilmu keagamaan tradisional, bahkan sebelum ia berangkat meneruskan pendidikan dalam hukum agama (*ṣari'ah*) Islam di Timur Tengah.

Sepenuhnya, identitas ke-kiai-annya memiliki kredibilitas penuh, didukung oleh perannya sebagai salah seorang mubaligh di ibu kota dewasa ini. Lebih dikenal sebagai gelar ustadz karena penampilannya yang membawakan vitalitas orang muda (walaupun sedikit banyak sudah “dirasuki” gaya jadi orangtua), ia merupakan sasaran kajian yang menarik untuk diperhatikan.

Bukan karena gaya keperempuanannya itu, bukan karena vitalitas usia muda yang diperhatikannya, dan bukan karena ia kini sudah mulai mengarah pada sikap orangtua.

Yang membuat kiai ini menarik adalah pandangan dunia yang dikembangkannya, yang sepenuhnya berlandaskan keyakinan akan kebenaran ajaran-ajaran agama yang dihayatinya sejak kecil. Pandangan dunia yang sering diharapkan akan memunculkan “ke-

klusyuk'an" (asketisme) hidup yang jauh dari perhatian pada masalah-masalah duniawi. Diharapkan dari seorang kiai hasil didikan Kiai Idris Tebuireng, tak akan menyimpang dari acara lama *amar makruf nahi munkar* yang biasa dikumandangkan para mubaligh dalam uraian-uraian mereka. Atau kalau tidak begitu, akan mengambil sikap agresif, menyerang tanda-tanda kerusakan moral, terutama di kalangan muda, sebagai bukti dari kerusakan akibat kehidupan modern yang sedang merayap ke bumi Indonesia juga.

Ternyata bukan itu yang muncul dari Kiai Masyhuri Syahid. Ia justru memberikan perhatian sangat besar terhadap soal-soal duniawi, terutama perdagangan. Maklum, ia juga senang berdagang di kalangan masyarakat Indonesia di Kairo.

Ia senang dengan isu-isu kemasyarakatan, karena ia terlibat dalam berbagai usaha sosial. Di samping menjadi sekretaris Yayasan Ikatan Alumni Timur Tengah di Jakarta, ia juga aktif di sebuah lembaga penganjur transmigrasi dan sebuah organisasi antar-pedagang kecil. Bahkan ia memotori penataran teknis elementer di bidang pengetahuan usaha bagi para anggota ikatannya, pedagang kecil dari berbagai sudut Jakarta, bekerja sama dengan PPN (Pusat Produktivitas Nasional). Sorban yang tersampir di bahunya tidak menghalanginya untuk transaksi dagang dengan siapa pun.

Tidak heran kalau muncul mutiara keagamaan yang tidak sedikit, yang menggambarkan kecenderungan

dan pandangan hidupnya. Seperti penafsiran “kontemporer”-nya atas ayat al-Qur’an, “Jika kalian mendapat teguran (baik), balaslah dengan sapa yang lebih baik” (*wa idza huyyitum bitahiyatin fa hayya bi ahsana minha*).

Tahiyah, menurut Kiai Masyhuri, bukan hanya tegur-sapa secara vokal atau oral belaka. Ia memiliki arti lebih jauh, hingga mencapai semua perbuatan yang menunjukkan penghargaan dan kepercayaan kepada kita. Kalau orang membeli barang yang kita produksi, itu berarti *tahiyah*, tegur-sapa dalam arti paling dalam. Nah, kita wajib menjawabnya dengan *tahiyah* yang lebih baik, tegur-sapa non-oral lebih baik: peningkatan kualitas barang yang kita tawarkan kepada pembeli.

Ini adalah esensi perbuatan membalas *tahiyah* yang baik dengan *tahiyah* yang lebih baik. “Ini menurut saya adalah ayat advertensi,” demikian ucap Kiai Masyhuri dalam salah satu acara tablighnya.

Herankah kita kalau ada penamaan kepada kiai yang satu ini, dengan pesan agamanya yang begitu kontemporer, sebagai kiai dollar?

Syaikh Mas'ud Memburu Kitab

Kiai Mas'ud bukan sembarang kiai. Ia diakui amat dalam pengetahuannya di bidang hukum agama. Ia menguasai peralatan untuk mengambil keputusan hukum fiqh, berupa teori hukum (*usul fiqh*) dan pedoman hukum (*qawa'id fiqh*). Kedua “alat” itu memang harus dikuasai sempurna, kalau ingin menghasilkan keputusan-keputusan hukum agama yang “berkualitas tinggi” hingga layak disebut “syaikh”.

Di tahun 50-an, yang dipanggil syaikh adalah Kiai Masduki dari Lasem, karena penguasaannya atas buku teks (kitab) utama di bidang teori hukum, yaitu kitab *Jam'ul Jawami'*. Tahun-tahun 80-an ini rupanya sudah ada pengganti Syaikh Masduki Lasem, yang sudah sekian tahun wafat. Dan dia itulah Kiai Mas'ud dari Kawunganten, Purwokerto.

Orangnya sederhana. Dalam pergaulan sangat bersikap rendah hati kepada orang lain, bahkan kepada yang lebih muda umurnya sekalipun. Suaranya tidak pernah dikeraskan. Penampilannya adalah penampilan kiai “kampung” yang tidak ada “kegagahan”-nya sedikit pun.

Tetapi, di balik penampilan “biasa-biasa saja” itu, tersembunyi sesuatu yang tidak disangka-sangka: kekerasan hati untuk melakukan pengejaran, yang mungkin tidak akan pernah berhenti: mengejar buku-buku teks agama yang secara tradisional digunakan di pesantren, atau seharusnya diajarkan di dalamnya.

Mengapa seharusnya? Karena memang belum diajarkan dan digunakan, karena baru merupakan naskah asli tulisan tangan, belum diterbitkan. Menurut “bahasa pesantren”, masih berupa naskah yang “belum dicap”.

Pesantren di Indonesia memiliki tradisi keilmuan agamanya sendiri, yang unik dan menarik untuk dikaji: tradisi mengembangkan produk ilmiah dalam bentuk karya-karya tulis para ulamanya.

Di sana para kiai dan santri tak hanya bergantung diri pada teks-teks “negeri Arab” saja—yang sebenarnya juga datang dari segenap penjuru dunia, seperti Afrika Barat, Asia Tengah, dan India. Dan tradisi pesantren untuk mengembangkan “karya lokal” ini akhirnya berpuncak pada munculnya ulama-ulama tangguh yang diakui secara internasional oleh dunia Islam di masanya. Misalnya Kiai Nawawi Banten, Kiai Mahfudz Termas (Pacitan), Kiai Muhtaram Banyumas, dan Kiai Ahmad Khatib Padang serta Kiai Abdussamad Palembang. Semuanya termasuk kelompok yang menguasai dunia pengetahuan agama di Makah selama sepuluh tahun, di sekitar peralihan dari abad ke-19 ke abad ke-20. Sekarang pun masih terasa sisa-sisanya

di sana, seperti terbukti atas pengakuan atas Syaikh Yasin Padang yang sudah menaturalisasi diri (*tajannus*) menjadi warga Arab Saudi. Karangan-karangannya tersebar di seluruh penjuru dunia Islam saat ini.

Dalam tradisi inilah pesantren mengembangkan dan mengajarkan “teks-teks lokal” yang dicetak di Kairo atau Makah, dan kembali ke mari sebagai “kitab agama” yang sudah diterima universal oleh dunia Islam. Yang terkenal adalah traktat kecil tentang tauhid (teologi) karya Kiai Nawawi Banten, berjudul *Nur al-Dzalam*, yang digunakan sebagai teks dasar di seluruh penjuru Tanah Air hingga saat ini. Lebih terkenal lagi dari kiai yang satu ini, yang bergelar “pemuka ulama Makah dan Madinah” (*Sayyid Ulama al-Hijaz*), adalah kumpulan empat puluh hadis pilihannya, berjudul *Hadisal-Arba'in*, yang digunakan tidak hanya di lingkungan pesantren, tetapi bahkan sampai di sekolah-sekolah non-agama juga.

Muhammadiyah dan NU, SI dan Perti, Islam Jama'ah dan Persis, semuanya menggunakannya sebagai teks dasar untuk tingkat permulaan dalam pengajaran hadis.

Nah, Syaikh Mas'ud adalah penerus tradisi ini, dalam arti sepenuhnya. Tidak hanya menggunakan yang sudah tercetak dan beredar luas, tetapi juga yang masih dalam bentuk tulisan tangan dan belum “dicap”.

Apa yang dirasakannya sebagai tugas adalah mencari karya-karya bermutu tinggi, hasil pemikiran para

kiai kita sendiri yang sudah meninggalkan dunia fana ini. Kemudian dihubungkannya dengan mereka yang berminat menerbitkannya.

Contoh menarik dari kerja ini adalah “perburuan”-nya yang intensif atas sebuah naskah unik karya Kiai Ihsan dari Pesantren Jampes (Kediri), yang wafat menjelang Perang Dunia II dan termasuk “angkatan Kiai Hasyim Asy’ari” dari Tebuireng, Jombang. Kiai Ihsan meninggalkan dua buah karya tulis utama. Yang satu berjudul *Siraj al-Talibin*, sebuah komentar atas traktat Al-Ghazali yang sudah seribu tahun umurnya, *Minhaj al-Abidin*. Karya dua jilid ini bernilai tinggi sehingga dijadikan buku wajib untuk kajian *postgraduate* di Al-Azhar dan beberapa perguruan tinggi lain (ironisnya, justru tidak dikenal orang-orang IAIN). Dicitak di Kairo, kini digunakan di seluruh pesantren dengan kajian mendalam atas tasawuf dan akhlaq.

Karya utamanya yang satu lagi belum sempat diterbitkan ketika pengarangnya berpulang ke rahmatullah, berjudul *Minhaj al-Imdad*, komentar atas traktat Irsyad. “Semuanya ada seribu dua puluh tiga lembar, Gus,” kata Kiai Mas’ud kepada saya sewaktu bertemu baru-baru ini. “Tulisan tangan dari penulis (katib) yang langsung didikte Kiai Ihsan sendiri. Kabarnya, katib itu berasal dari Pecangakan di Bojonegoro”. Ia pun meneruskan sejumlah “data primer” lagi tentang karya belum “dicap” tersebut.

Ini ciri karakteristik dari “pemburu” yang gila dengan buruannya. Sayangnya, karya tersebut mendadak hilang sejak beberapa tahun yang lalu. Dan Kiai Mas'ud, karena kecintaannya yang begitu mendalam pada tradisi ke-”kitab”-an kaum pesantren, memburunya dengan tekun, bertanya kian ke mari. “Alhamdulillah, sekarang saya sudah tahu di tangan siapa naskah itu, akan diikhtiarkan memperolehnya. Syaikh Yasin Padang sudah menyatakan kesediaan mencetaknya di Makah,” katanya bersemangat.

“Kegilaan” yang mengesankan: perburuan yang mengagumkan dari seorang kiai yang amat dalam pengetahuan agamanya, tetapi tenggelam dalam keasyikan yang tidak disadarinya memiliki arti penting bagi pengetahuan ke-Islam-an di negeri ini. Mungkin malah di seluruh dunia, katakanlah dua puluh tahun lagi.

Pada waktu nanti karya tersebut sudah “dicap”, digunakan sebagai sumber bernilai tinggi di mana-mana, siapakah yang ingat jasanya melakukan “pemburuan” itu? Mungkin tidak ada lagi yang ingat. Dan Kiai Syaikh Mas'ud tidak peduli juga. Karena ia sudah puas, sudah merasa menunaikan tugas yang dipilihnya sendiri.



Kiai Pencari Mutiara

Sebagaimana banyak terjadi pada kiai pesantren, Kiai Sahal KAJEN adalah perokok kelas berat. Itu tidak hanya tampak pada rokok yang selalu dipegang dan diisapnya, tapi juga keadaan fisiknya: kurus-kering dan tenggorokan yang acap terkena penyakit batuk.

Kebiasaan merugikan itu mungkin datang dari “kebiasaan kiai” untuk sedikit tidur dan berlama-lama dalam keadaan bangun. Kalau tidak untuk membaca kitab-kitab agama sendirian hingga larut malam, tentu untuk menemui tamu yang mengajak berbincang tentang banyak hal. Belum lagi kedudukan sebagai Sekretaris Syuriah NU Wilayah Jawa Tengah, yang membawa tambahan kerja rutin menerima tamu atau mengikuti rapat yang menghabiskan waktu.

Lahir, dibesarkan, dan juga akhirnya menetap di “desa pondok” KAJEN di Kabupaten Pati—sebuah desa dengan belasan pesantren yang hidup terpisah satu dari yang lain—Kiai Sahal dididik dalam semangat memelihara derajat penguasaan ilmu-ilmu keagamaan tradisional. Apalagi di bawah bimbingan ayahnya sendiri sewaktu kecil, Kiai Mahfudz, yang juga “kiai

ampuh”, adik sepupu almarhum Ra’is ‘Am NU, Kiai Bisri Syansuri.

Kemudian, ia melanjutkan pelajaran dengan bimbingan “kiai ampuh” lain, seperti almarhum Kiai Zubair Serang. Pada dirinya terdapat tradisi ketundukan mutlak pada ketentuan hukum dalam kitab-kitab fiqh, dan keserasian total dengan akhlak ideal yang dituntut dari ulama tradisional. Atau dalam istilah pesantren, ada semangat *tafaqquh* (memperdalam pengetahuan hukum agama) dan *tawarru’* (bermoral luhur).

Tidak heran kalau Kiai Sahal lalu “menjadi jago” dalam usia muda. Belum lagi berusia 40 tahun ia telah menunjukkan kemampuan tinggi dalam forum-forum fiqh. Ini terbukti pada pelbagai sidang *bahtsul mas’al* tiga bulanan yang diadakan Syuriah NU Jawa Tengah secara teratur–sidang yang menampung masalah yang muncul dari masyarakat.

Bulan lalu di Moga, Pemalang, misalnya, Kiai Sahal muncul kembali dengan cemerlang. Sekian ratus kiai membahas sebuah masalah pelik: kawin lari. Haramkah, atau halal? Bagaimana kedudukan ayah atau wali yang menurut mazhab memiliki wewenang menetapkan jodoh seorang anak gadis?

Bergiliran para kiai berbicara berbagai pendapat dengan argumennya, kemudian diserahkan kepada sebuah tim perumus untuk memberikan keputusan redaksional di ujung pertemuan dua hari.

Sementara menunggu, Kiai Sahal diminta berbicara sekitar masalah itu kepada mereka yang tidak turut bersidang dengan panitia perumus. Dalam pidato tanpa persiapan itulah tampak kebolehan kiai. Ia berkali-kali menyebutkan kutipan panjang dalam bahasa Arab dari *Kitab Syarqawi*, salah satu kitab utama mazhab Syafi'i, tanpa melihat catatan sekalipun.

Pendeknya, masalah kawin lari harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Kompleksitas hukum fiqh dan berbagai jawaban yang diberikannya terhadap kasus yang berlainan satu dari yang lain, menjadi menonjol dalam penyajian Kiai Sahal itu.

Gambaran sepintas tentang “cara kerja” dan orientasi yang serba legal-formal yang dianut Kiai Sahal itu secara sepihak tentu terasa kaku. Tidak tanggap terhadap kehidupan secara umum, hanya pendekatan kasuistik. Tidak memiliki “filsafat kehidupan” yang luas, atau “kerangka humanistik” yang besar. Tidak jelas kerangka kemasyarakatan (*social frameworks al-manhaj al-ijtima'i*) yang dicoba dikembangkannya.

Anehnya, kiai berambut penuh uban pada usia yang belum tua itu, bersikap cukup “aneh” bagi kalangan pesantren tradisional. Apalagi pesantren daerah pesisir utara Jawa.

Mula-mula menerima “masukan baru” berupa proyek pengembangan masyarakat, dibawa oleh LP3ES dari Jakarta. Perhatiannya diminta untuk

memimpin kerja yang dulunya tidak pernah dipikirkan kiai pesantren, seperti pelestarian lingkungan (karena ada pencemaran oleh mata pencaharian utama di Desa Kajen itu, yaitu membuat tepung tapioka), memperkenalkan teknologi terapan bagi penduduk desa (tungku Lorena yang menghemat energi dan sebangsanya), dan memulai usaha merintis pengembangan organisasi ekonomi yang lebih mandiri di kalangan rakyat pedesaan.

Usaha bersama sebagai wadah pra-koperasi diprakarsainya dalam usaha membuat dan kemudian memasarkan “krupuk *taxamum*” (digoreng dengan pasir) dari bahan dasar tapioka. Cukup lumayan, mampu menyerap tenaga kerja sekian kepala keluarga yang tadinya menganggur di desa miskin itu.

What Makes Sammy Run? Apa yang membuat Sammy berlari? Dan apa yang menggerakkan Kiai Sahal? Bagaimana kiai yang sering dibuat bingung oleh istilah Inggris atau Belanda itu mencapai “kearifan” di atas? Dan berani mempertaruhkan kewibawaannya di kalangan sesama ulama pesantren dengan menerima kehadiran seorang “bule” Amerika, beragama Katolik, untuk tinggal dan mengajar bahasa Inggris di pesantrennya?

Jawabannya: fiqh itu sendiri. Keputusan-keputusan hukum agama di masa lampau diperlakukan secara menyeluruh (bahasa sekarang, komprehensif) dan seimbang. Bukankah dalam *Ihya'* Imam Ghazali banyak mutiara yang berhubungan dengan masalah

gizi? Bukankah kitab-kitab fiqh cukup mengatur hubungan dengan “orang *dzimmi*” (orang non-muslim)?

Bukankah kewajiban mengatur kehidupan bermasyarakat dalam totalitasnya, bukan hanya aspek legal dan politiknya, sudah begitu banyak dimuat kitab-kitab lama? Mengapa tidak diperlukan keputusan-keputusan lepas dalam fiqh itu sebagai untaian mutiara yang memunculkan kerangka kemasyarakatan yang dikehendaki?

Toh, Kiai Sahal tidak pula kehilangan hubungan dengan sesama kiai pesantren. Terbukti dari pengayoman oleh sesepuh para kiai di desanya sendiri, Kiai Abdullah Salam. Kiai ini pemimpin pesantren hafalan al-Qur'an dengan keluhuran akhlaknya (yang takut menerima bantuan uang dari orang kaya ataupun pemerintah, karena takut “kecampuran barang haram”, dan begitu dihormati tokoh legendaris Mbah Mangli di Jawa Tengah) memberikan persetujuan penuh atas kerja-kerja yang dilakukan Kiai Sahal.

Itu memang bukti kuatnya akar “rangkaihan mutiara” seperti yang dipungut Kiai Sahal itu, untuk masa lampau ataupun masa depan.



Yang Umum dan Yang Khusus

Sebagaimana umumnya dosen angkatan lama, Pak Hasan lemah-lembut dalam segala hal. Ketika berbicara suaranya tidak begitu keras, nadanya datar. Kalau mengemukakan sesuatu tidak begitu menggebu-gebu, tetapi teratur dan sistematis. Istilah yang digunakan sudah baku; dan dipahami sama oleh para pendengarnya, karena jelas yang dimaksud. Tidak banyak memerlukan ilustrasi deskriptif, apalagi yang bersifat gambaran fisik. Prinsip-prinsip dan kategori-kategori lebih penting daripada deskripsinya sendiri.

Ia terlibat dalam kegiatan “turun ke bawah” yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tempat ia bekerja—sudah tentu dalam kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Pekerjaannya memperkenalkan teknologi yang sederhana dan lebih sesuai dengan kebutuhan sehari-hari rakyat pedesaan, seperti juga banyak “aktivis pedesaan” yang berkiprah ke bawah.

Namun, ternyata ia melakukan sesuatu yang besar sekali artinya bagi kita semua, tidak seperti yang dilakukan teman-teman sesama aktivis. Yang dilakukannya adalah menyiapkan “lahan kemasyarakatan” bagi teknologi yang ditawarkannya—berupa penumbu-

han kesadaran dan kebutuhan akan teknologi tersebut. Ia berarti menciptakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang akan mengembangkan teknologi yang bersangkutan.

“Kami mencoba memperkenalkan *bio-mass* sebagai bahan bakar pengganti kayu untuk keperluan dapur. Ternyata tidak mudah. Karena ibu rumah tangga yang menjadi sasaran kami bukan hanya seorang individu. Ia juga anggota keluarga, dan setelah itu warga masyarakat. Untuk membuat ia menerima *bio-mass* keluarga dan masyarakat harus dibuat menerimanya. Dan itu berarti kami harus mendorong munculnya sarana tempat memutuskan sikap, menerima atau menolak gagasan yang ditawarkan. Juga mengelola penggunaan teknologi yang diujakan itu.”

Bekerja sama dengan para pamong desa setempat, melalui izin pemerintah daerah, Pak Hasan dan kawan-kawan berhasil merintis sejumlah proyek penumbuhan kebutuhan dan keinginan tersebut. Sebuah “proyek penawaran teknologi” yang dimulai di sebuah desa, dengan segera berhasil melipatgandakan diri menjadi kegiatan yang mencakup dua puluh desa lain dalam waktu cepat.

Kiai Madun lain lagi. Ia “menawarkan” pesantren asuhannya kepada masyarakat dengan melakukan sesuatu yang fundamental bagi pesantrennya: menjadikan lembaga pendidikan yang dikelolanya “pusat pengembangan masyarakat”.

Para santri asuhannya berlatih cara-cara mendorong masyarakat, melalui kegiatan ekonomi secara pra-kooperatif (dengan merk “Usaha Bersama”) dan kemudian kooperatif. Juga membawa teknologi baru yang sederhana. Memperkenalkan kesadaran bergizi dan KB. Sibuk dengan urusan pelestarian lingkungan. Alhasil, menampilkan pesantren sebagai salah satu “pangkalan” mengubah wajah hidup masyarakat secara total. Menawarkan agama sebagai “mendorong motivasi keagamaan bagi pembangunan”.

Ada pos obat di lingkungan pesantrennya, ada karang kitri dan apotek hidup untuk masyarakat. Ada latihan keterampilan “yang sudah disempurnakan”. Berbagai kegiatan teknis untuk memperbaiki pola kerja dimulai, baik di bidang pertanian, kerajinan tangan maupun kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Isha adalah seorang intelektual kelas berat. Jidatnya lebar, menerbitkan kesan banyak berpikir. Kalau berbicara senang istilah asing, biar dikira orang pandai. Banyak teori dilontarkannya. Namun, ia jauh lebih baik dari sejumlah intelektual lain, yang senang hanya dengan retorika melambung dan pikiran ideal, tanpa mampu menerjemahkannya ke dalam kegiatan operasional yang berangkai.

Yang menarik adalah komentarnya tentang apa yang dilakukan Pak Hasan dan Kiai Madun tadi. Pak Hasan katanya memakai pendekatan “tawaran” umum dalam pembangunan di pedesaan. Jalurnya adalah kebutuhan umum masyarakat sendiri. Kebutuhan itu

disentuh melalui kelembagaan biasa, seperti arisan, paguyuban RT/RK, dan sebagainya. Sebaliknya, Kiai Madun, ia mengajak pada hal yang sama melalui keunikan, kekhususan pesantren.

Pada pendekatan umum itu ada kelebihan penting, yakni mudahnya replikasi atau penggandaan. “Sekali gagasan dasarnya diterima baik, seterusnya jalan sudah licin”, kata intelektual kota yang spesialisasi urusan pedesaan itu. Namun, sering terjadi justru penerimaan gagasan dasar itu sangat lama berlangsung. Sebaliknya, pendekatan khusus untuk menawarkan pembangunan melalui paham, ideologi, agama, atau lembaga tertentu yang memiliki keunikan, sangat cepat diterima. Yaitu, kalau pimpinannya sudah “tersentuh”.

Tokoh seperti Isha ini ternyata mampu memaparkan jalinan dua pendekatan yang komplementer dan sama pentingnya, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Banyakkah di antara kita yang memahami keadaan secara terpadu seperti si Isha?

Skala Prioritas Ibadah

Apa yang dilakukan para kiai Rembang, beberapa waktu yang lalu, memang terasa aneh: membuat skala prioritas ibadah. Kalau prioritas pembangunan bukan barang baru.

Di kota pantai utara Pulau Jawa itu, seorang pemilik toko yang menjual skuter dan sepeda motor, sisa-sisa kelas pedagang santri yang jaya di masa lampau, tiap tahun melakukan ibadah haji ke Makah. Ibadah haji pertama memang wajib, tetapi pengulangannya tidak. Hanya diseyogyakan. Dalam istilah hukum agama (fiqh) disebut disunnahkan.

Ada yang menanyakan kepada para kiai di Rembang itu status haji sunnah yang dilakukan berkali-kali, padahal ada yang lebih membutuhkan pembiayaan, yaitu pembangunan gedung sekolah agama, alias madrasah.

Jalan pikiran penanya itu sebenarnya sesuai dengan penalaran manusia yang membangun. Bukankah Nabi Muhammad bersabda, “menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin, laki-laki dan perempuan.”

Para kiai lantas membahasnya dalam majelis fiqh yang mereka selenggarakan secara teratur. Sudah dapat diduga: mereka akhirnya membenarkan pendapat—dan imbauan—penanya di atas. Namun, bukan keputusannya yang penting, melainkan proses tercapainya. Dasar pengambilan keputusan itu tepat kalau disebut “indikator skala prioritas.” Seolah-olah merupakan sesuatu yang empiris, padahal bukan.

Para kiai Rembang ternyata tidak mendasarkan keputusan mereka pada penalaran yang dikemukakan si penanya. Penalaran seperti itu terlalu rasionalistik, tidak sesuai dengan sendi-sendi pemikiran keagamaan mereka. Menurut “kamus fiqh” yang mereka anut, tidak ada tempat untuk penalaran rasional yang tuntas, yang langsung menggunakan ayat al-Qur’an atau sabda Nabi. Itu kelancangan, apalagi kalau dilakukan orang yang tidak kompeten.

Dalam pandangan mereka, untuk penalaran di bidang fiqh, harus ada kerangka penglihatan yang jelas, dan kerangka berpikir serba-deduktif itu disistematisasikan dalam sebuah teori hukum, yang dinamai usul fiqh. Metode inilah yang menentukan bagaimana ayat al-Qur’an atau sabda Nabi harus diberlakukan dalam setiap masalah yang timbul. Juga bagaimana keputusan yang diambil kalau tidak ada “dalil” yang berupa ayat al-Qur’an dan sabda Nabi—melalui analogi (*qiyas*), konsensus (*ijma'*), dan sebagainya.

Ada sekian puluh kaidah yang telah dibakukan, dengan tujuan dipakai sebagai “pedoman” dalam peng-

ambilan keputusan. Yang terkenal adalah *Asybah wa-Naza'ir*, karya utama As-Suyuti yang sudah berumur hampir enam abad. Dalam *Asybah* itulah mereka dapati kaidah yang berhubungan dengan kasus tadi. Bunyinya sederhana: "Amal perbuatan yang berlanjut diutamakan atas amalan yang terhenti." (*al-'amalu al-muta'addi afdhalu minal amalil qashir*).

Amal kebajikan yang berlanjut adalah yang kegunaannya dirasakan orang lain. Bahasa Jawa model pesantrennya disebut *sumbrambah olehemignani*. Sedangkan yang terkini adalah yang kegunaannya kembali kepada si pelaku. Maka, selesailah pembahasan para kiai. Mendirikan madrasah amal kebajikan berlanjut. Jadi diutamakan.

Aplikasi kaidah yang sedemikian sederhana itu ternyata adalah bidang para kiai. Dalam batas-batasnya sendiri, bukankah ia perlu didorong untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas kegunaannya bagi masyarakat? Titik-tolak mengaitkan "sistem kaidah" dengan tekanan di bidang kemasyarakatan pun sudah diantisipasi oleh kaidah lain, yakni: *tasharruful imam al-ra'iyah manutun bil masahah*. "Kebijakan si pengambil keputusan mengikut kepentingan rakyat."



Dokter Idealis Kiai Formalis

Prototipe dokter masa lampau adalah seorang idealis. Pekerja sosial yang mengabdikan pada kemanusiaan. Tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi juga memimpin masyarakatnya. Tidak hanya menyembuhkan manusia dari segi fisik, tetapi juga mengobati situasi kejiwaan masyarakatnya. Tidak heran kalau dari kelompok itu lahir pejuang-pejuang yang tangguh, seperti Dokter Soetomo. Pantas pula kalau profesi dokter adalah idam-idaman tertinggi remaja kita hingga belasan tahun lalu.

Kini, keadaan sudah berubah. Banyak dokter yang lebih banyak memikirkan tentang kekayaan secepat mungkin melalui praktik medis, dan melalaikan aspek kemanusiaan. Sikap pribadi mereka terlihat dalam sikap rumah-rumah sakit tempat mereka bekerja: ada yang tega menolak pasien yang sudah gawat, hanya karena tidak mampu membayar uang muka biaya perawatan sepuluh hari sekaligus.

“Pembuangan” dokter-dokter yang baru lulus, punya motif pemerataan pelayanan kesehatan. Di samping itu, juga membawa hasil positif: para dokter muda terpaksa menumbuhkan orientasi pengabdian,

minimal kalau mereka mau mengerti. Walaupun tidak semua memiliki sikap mental seperti itu, bagi kebanyakan dokter muda, bekas mendalam di hati dari “masa pembuangan” itu.

Memang masih ada juga yang sudah mulai sombong dan main bentak pasien di beberapa puskesmas, apalagi yang terletak di pedesaan. Seolah para pasien orang kecil itu, yang sering hanya bisa menghargai kerja dokter dengan imbalan *in natura*, harus dijadikan sasaran kekesalan hati menjalani “masa pembuangan” di tempat terpencil. Apalagi kalau sampai akhir “masa pembuangan” tetap belum terbayang tempat penempatan yang “gemuk pasien.”

Untunglah, tidak semua dokter bersikap seperti itu. Dan kepuasan yang diperoleh para dokter jenis ini bersifat rohaniah: berhasil menunaikan pengabdian dan menunjukkan kebolehan profesional, sering menghadapi tantangan penyakit berat yang harus diatasi dengan obat-obatan sangat minim dan peralatan yang tidak mencukupi.

Tetapi, justru para dokter muda idealis itulah yang sering harus menjumpai kepahitan setelah kembali ke “dunia normal.” Di rumah sakit metropolitan, misalnya, dengan kehidupan serba-materialistis dan berorientasi sangat finansial, belum lagi kalau “dilengkapi” situasi birokratis yang memuakkan. Juga di rumah sakit kecil, menjadi “dokabu” alias dokter kabupaten, yang kepala dinasny sering menuntut perlakuan sebagai dewa. Birokrasi memiliki hukumnya

sendiri—terutama kejelasan antarlembaga dan kekakuan sikap institusional. Kalau sudah dijatahkan hal ini atau itu harus dilakukan, tidak boleh ada penyimpangan sedikit pun. Tidak peduli keadaan medan yang dihadapi, atau manusia yang harus rugi. Pembagian wilayah kerja di antara berbagai lembaga juga menimbulkan pengkotakannya sendiri, dengan akibat dengki dan iri sebuah lembaga pemerintah jika lembaga lain “menjarah” wilayahnya.

Seorang dokter muda di sebuah kota kecil di pantai utara Jawa, misalnya. Pikiran-pikirannya yang jernih tidak mendapat sambutan yang positif dari semua koleganya, apalagi atasan. Sikap ugal-ugalannya juga membuat ia dicurigai jajaran pemerintah daerah. Jelas sekali, promosi tidak akan diperolehnya; kenaikan gaji berkala tidak akan datang dengan sendirinya; dan konduite kepegawaiannya akan terus menurun, sehingga nanti dicari alasan tepat untuk membuangnya ke daerah lain.

Pada tumpukan prospek gelap itu, ia harus terbentur pada kasus tambahan ini: sikap seorang kiai tarekat yang kukuh pada sikap hidupnya. Anaknya menderita penyakit paru-paru, akibat pecahnya bibir atas—sejak lahir—hingga ke rongga hidung. Udara tidak tersaring lagi, dengan demikian segala gangguan paru-paru dapat terjadi dengan mudah. Kesimpulannya, belahan bibir atas harus ditutup dengan transplantasi kulit.

Kesulitan bermula: sang kiai keberatan kalau diambilkan kulit orang lain. Bagaimana pertanggungjawaban di akhirat kelak, memakai hak milik yang ditentukan Allah bagi orang lain? Dijawab justru harus diambilkan dari kulit sendiri, menjadi persoalan pula. Dari mana dokter menyatakan, dari pantat. Sang kiai menjawab tidak mungkin. Kulit pantat adalah bagian dari aurat seseorang: berarti harus ditutup kalau akan sembahyang. Apakah harus menggunakan tutup muka seperti Zorro?

Dokter menjawab, kulit menjadi aurat hanya ketika berada di bagian yang dinamakan aurat. Begitu dipindahkan, ia sudah bukan aurat lagi. Sang kiai yang setia dengan metode berpikir formalistisnya, belum puas. Kalau “anu”-nya seorang laki-laki dipasang ke mukanya, dan ternyata bisa bergerak jika ada rangsangan, apakah juga bukan aurat?

Sang dokter terpana. Ada birokrasi. Ada kesemrawutan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Dan sekarang, dengan hanya satu contoh formalisme, akan lunturkah idealismenya?

Mu'allim Syafi'i

Kaum muslimin Betawi memang lebih dekat dengan budaya Arab dibanding dengan kawasan-kawasan lain. Bukan hanya habib dan sayyidnya, semuanya keturunan Nabi Muhammad yang harus dimuliakan dan disegani, yang menjadi sebab; juga bukan karena di Jakarta sudah ada kampung Pakojan yang penuh orang Arab. Ada yang lebih dalam dari itu.

Para ulama Betawi umumnya dididik di Timur Tengah—dulu di Makah, dan sekarang kebanyakan di Mesir. Dengan sendirinya, budaya Arab bukan sesuatu yang terasa asing. *Anedan* ~~antes~~ sudah menjadi kata ganti diri yang umum dipakai, seperti *kula* dan *ampean* di kalangan “Jawa *kowek*.” Orang asli Tegal-parang di Mampang Prapatan lebih mudah menyebut “nyahi” daripada mengatakan “minum teh,” diambil dari istilah Arab “syahi” untuk “teh.”

Karena itu, tidak mengherankan jika ulama Betawi disebut *mu'allim*. Bukan lantaran pandai mengemudi-kapal, melainkan karena kerjanya mengajar. Dalam bahasa Arab, arti kata *mu'allim* adalah mengajar dan *ta'lim* berarti pengajaran. Bukan sembarang mengajar,

melainkan mengajar ilmu-ilmu agama Islam. Kalau sekadar guru, panggilannya *mudarris* sering juga *ustadz*. Ini adalah istilah yang tidak hanya benar menurut bahasa Arab, tetapi sudah diberi arti khusus sejak dari *sononye* Orang Jawa memanggil guru agamanya *kiai*, orang Minang *lebai*, di Iran dan Iraq disebut *mulla*, di Syria, Libanon, dan Mesir dipanggil *mu'allim*.

Mu'allim Syafi'i yang dibicarakan kali ini adalah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang wafat beberapa hari setelah hari raya Idul Adha lalu. Saya memanggilnya demikian karena memang ia disebut demikian ketika saya masih kecil. Gelar kiai baru datang belakangan, ketika berlangsung proses Jawanisasi yang datang ke Jakarta secara merayap.

Sebagai mu'allim, Syafi'i telah memberikan segala-galanya pada profesi pilihannya itu. Mengajar di surau pada mulanya, lalu membuat madrasah dekat Gudang Peluru di Bali Mataram, ketika jalan beraspal belum menjangkau daerah itu. Tidak cukup mengajar di madrasah, dengan tekun dijalaninya tugas memberikan pengajian umum rutin di hampir semua kampung Jakarta Selatan dan Timur. Pengajian berkala yang membawanya ke kampung yang berbeda-beda, sekarang memperoleh predikat mentereng majelis taklim. Juga tidak lupa di tempat sendiri, pengajian diselenggarakan seminggu sekali. Setelah sekian lama, apa yang diselenggarakannya itu ternyata menjadi monumen sendiri di ibu kota tercinta ini.

Melalui pengajaran dasar-dasar agama kepada orang awam, sang mu'alim mampu membuat sesuatu yang sangat berarti di Jakarta. Apa yang dicapainya? Menumpulkan dampak negatif dari proses modernisasi. Spiritualitas yang diujakannya mampu mengatasi kekeringan jiwa manusia, yang terhimpit kehidupan berorientasi serba-benda. Solidaritas kuat sesama warga pengajian merupakan penangkal terhadap rasa keterasingan, akibat terurainya ikatan-ikatan sosial lama dalam kehidupan berumah tangga dan bertetangga. Di saat banyak nilai-nilai mulia memudar, ajakannya pada penghayatan dan pengamalan agama secara tuntas merupakan panduan jelas bagi para pengikutnya.

Tetapi, semua itu bukan menjadi suatu yang dimonopoli oleh mu'allim Syafi'i belaka. Hal itu juga diperankan oleh para mu'allim Betawi dan kiai non-Betawi di Jakarta. Ke-mu'allim-an Kiai Abdullah Syafi'i baru tampak jelas jika dilihat pada pola sikapnya terhadap "tantangan dari luar." Tantangan yang secara fundamental bertentangan dengan ajaran agama yang diyakininya. Ketika Ali Sadikin masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Mu'allim Syafi'i adalah pelopor yang dengan gigih menentang kebijaksanaan mencari dana melalui perjudian. Begitu juga kebijaksanaan penggusuran pekuburan, dari Karet ke Tanah Kusir. Semua sanggahannya berdasar pada ajaran agama, sehingga terasa mencekam.

Mengapa ia justru bergaul erat dengan Ali Sadikin walaupun sang gubernur tetap saja mengizinkan per-

judian? Apakah sang mu'alim telah melupakan perjuangan, karena status sosialnya mencapai ketinggian baru? Apakah ia sudah terbuai dengan penghormatan sang gubernur kepadanya?

Ternyata tidak demikian. Sebabnya sederhana saja, ia tahu batas peranan yang harus dimainkannya: sekadar mengajarkan pendirian agama. Bukan menentang pemerintah. Juga bukan menyusun kekuatan (*mact-vorming*) untuk memaksakan pendirian. Kalau pendirian agama sudah dirasa cukup disampaikan, sudah cukup tugas dilaksanakan. Tak perlu rusak pergaulan karenanya, dan tak harus bersitegang leher sebagai akibat perbedaan pandangan. Sikap inilah yang memancarkan kebesaran Mu'allim Syafi'i karena dari kiai kampung yang kemudian menjadi ulama besar ini muncul keteladanan cemerlang akan perlunya kesadaran peranan sendiri dalam kehidupan. Memang untuk jangka pendek ia tidak dapat memberantas perjudian. Namun, dalam jangka panjang ia memelihara sesuatu yang sangat berharga: budaya politik yang mantap karena ia menggunakan hak untuk berbicara dalam ukuran yang tepat. Bukankah hal ini hakikat demokrasi?

Lebih penting lagi, siapakah yang tadinya menduga bahwa sikap demokratik itu muncul justru dari garis batas yang diletakkan agama sendiri, yaitu dalam tugas mengajar selaku mu'allim?

In Memoriam: **Kiai Achmad Shiddiq**

Sudah sejak beberapa bulan sejumlah ulama berfirasat tajam mengingatkan penulis, bahwa NU akan kehilangan lagi kiai besar. Bahkan Kiai Dahlan Trenggalek agak eksplisit: NU jangan bergantung hanya kepada satu orang, siapa pun orangnya. Bahkan kiai seampuh Kiai Achmad Shiddiq pun hanya seorang manusia belaka, yang dapat dipanggil Tuhan sewaktu-waktu. Kiai Hamiem Jazuli Ploso (Kediri), alias Gus Miek, memberi isyarat tanggal 16 Desember yang lalu, agar NU mempersiapkan calon Rais 'Am baru.

Karenanya, sewaktu mendengar Kiai Achmad (begitu penulis senantiasa menyebut nama ayahnya Kiai Shiddiq) masuk rumah sakit, penulis sudah mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima berita yang terburuk sekalipun. Namun, di kala kabar itu datang, ia tetap saja merupakan pukulan palu godam yang meremukkan hati dan menggoncangkan jiwa. Hanya dengan disiplin baja penulis mampu menahan diri untuk tetap bersikap tenang dan berlaku normal seperti biasa. Padahal keinginan hati ingin langsung

berangkat ke Surabaya lalu langsung ke Jember, paling tidak agar dapat melihat wajahnya untuk terakhir kali, sebelum dikuburkan. Untuk mereguk kemuliaan hati, pikiran, dan sikap jiwanya.

Ya, Kiai Achmad memang seorang mulia. Bukan karena ia melebihi manusia lain. Sering ia bersikap ragu, bahkan ia mungkin peragu kelas berat. Juga sering bersikap emosional menghadapi urusan-urusan kecil. Begitu pula, ia terkesan menutupi diri ketika menghadapi gencetan dan serangan dari kanan dan kiri. Dan mungkin terlalu mudah menerima pertimbangan orang-orang di sekitarnya di Jember atau di tingkat Jawa Timur, sehingga sering menjadi pusing sendiri.

Tetapi, semua kekurangan kecil itu justru mempertegas kemuliaan jiwa, hati, dan pikirannya. Bahwa sebagai manusia dengan keterbatasan-keterbatasan seperti itu, ia justru dapat meraih ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh mereka yang lebih kuat. Bahwa dengan kelemahan itu ia justru mampu menjadi nahkoda yang membawa kapal NU mengarungi badai dahsyat setelah NU kembali ke *khittah*-nya semula. Dia tetap mampu menjaga agar NU tetap berada pada jalur *sunnah* (jalan)-nya semula. Mendiang Presiden John F. Kennedy pernah menggambarkan kepemimpinan sebagai sikap nahkoda kapal yang tengah menempuh badai. Bukan berlari-lari menimba air kembali ke laut, seperti para kelasi, melainkan membuang jangkar lalu tidur, menunggu badai berlalu.

Baru setelah itu membuang sauh dan membawa kembali kapalnya berlayar. Seperti itulah kira-kira sikap Kiai Achmad Shiddiq dalam memimpin NU. Dengan catatan ia tidak langsung tidur, tetapi lebih dulu bersembahyang malam, menyerahkan segala urusan kepada Allah Swt.

Nahkoda berpegang pada susunan perbintangan di cakrawala yang cerah. Kiai Achmad berpegang pada sejumlah kaidah hukum agama yang membawakan tatanan masyarakat yang ideal. Kaidah akan pentingnya memelihara keselamatan umat yang dipimpin. Kaidah akan pentingnya mencapai cita-cita secara bertahap. Kaidah akan pentingnya perlindungan bagi pihak lain yang lebih lemah. Kaidah akan pentingnya persaudaraan antarsesama manusia ditegakkan dengan segala daya upaya. Kaidah akan pentingnya arti kemanfaatan suatu tindakan atau langkah yang diambil. Sikap seperti itu ia peroleh dari kesetiaannya pada hukum agama (*fiqh*). Dan itulah salah satu sisi yang berhasil digunakannya untuk mewarnai kehidupan NU sejak ormas itu dipimpinnya.

Tetapi, ia bukan hanya pengikut hukum agama yang setia dan patuh. Ia juga memiliki spiritualitas atau derajat kerohanian yang memperkaya sikap taat dan patuh itu. Melalui pergaulan eratnya dengan almarhum Kiai Hamid dan Gus Miek, dan melalui keterikatan pada ritus *dzikrul ghafilin* (pengingat mereka yang lupa), ia mampu mengembangkan sebuah dimensi lain dalam situasi keagamaan warga NU;

kecintaan dan kasih sayang yang mengatasi perbedaan, apapun perbedaan antarmanusia yang ada. Sejak tahun 70-an, ia melakukan pengembaraan rohani seperti itu, dan sewaktu ia menjadi Rais 'Am PBNU, getaran rohani penuh kasih sayang kepada sesama itu telah membentuk sikap dan kepemimpinannya.

Bertolak dari dimensi kerohanian atau spiritualitas itulah, ia mengajukan uluran tangan persaudaraan kepada Muhammadiyah. Gayung bersambut, dan bergandengan tanganlah Kiai Achmad dan Pak AR, Ketua PP Muhammadiyah waktu itu. Proses yang menyejukkan hati umat Islam mulai menggelinding, betapa lambat pun gerak langkah yang dilalui. Kepada umat non-muslim ditawarkannya wawasan persaudaraan mereka yang berbangsa (*ukhuwah wathaniyah*).

Orang tidak perlu dibedakan hanya karena berlainan agama atau keyakinan. Wawasan yang diajukan dalam Munas NU 1987 di Cilacap itu tidak hanya menyentuh kaum non-muslim saja, tetapi juga orang Islam yang tidak tergabung dalam gerakan Islam mana pun. Muslim formal, muslim informal, dan muslim non-formal dianggap sesama saudara, sebuah sikap yang menyejukkan.

Rumusan Kiai Achmad yang diterima Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo 1984 tentang hubungan agama dan negara, juga diwarnai oleh pengertiannya yang mendalam akan hakikat persoalan utama kita sebagai bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

bentuk final perjuangan kaum muslimin adalah rumusan sederhana dengan implikasi sangat jauh bagi pluralitas corak kehidupan bangsa kita di masa depan. Akan semakin berkembangkah pluralitas itu dengan keberkahan bagi semua, ataukah sistem akan dikikis oleh sektarianisme agama? Jawaban Kiai Achmad, di samping karena penguasaannya yang mendalam atas hukum agama dan spiritual jiwanya yang penuh kasih sayang, juga bersumber pada derajat kecendikiawanan almarhum. Diikutinya pertumbuhan bangsa ini dengan kepedulian yang jujur dan konsisten.

Kecendikiawanan yang diwarnai oleh kepedulian mendalam atas nasib masa depan bangsa itulah yang melahirkan keberanian melahirkan gagasan besar yang demikian drastis bagi setiap orang pemimpin formal gerakan Islam.

Menjadi munafikah Kiai Achmad terhadap agamanya sendiri? Ternyata tidak. Dalam sebuah sidang DPA, ia bersikeras pada pendirian bahwa hanya seorang muslim yang dapat diterimanya sebagai kepala negara, sebagai presiden/mandataris MPR. Mungkin pandangan yang tidak konsisten dengan wawasan persaudaraan umat sebangsa yang dilontarkannya sendiri. Tetapi, yang dapat dipahami wajar saja keluar dari seorang kiai yang memimpin sebuah ormas Islam. "Penyimpangan" pandangan seperti ini tidak mengurangi sedikit pun kebenaran wawasan hukum keberagamaan, spiritualitas penuh kasih-sayang, dan kepedulian seorang cendikiawan yang dimilikinya dalam pertimbangan demikian baik.

Kiai Hasyim Asy'ari, selaku Rais Akbar, membawakan ketinggian derajat kompetensi ilmu keagamaan sangat tinggi ke dalam tubuh NU, yang masih menjadi standar kepemimpinan tertinggi orang itu. Kiai A. Wahab Chasbullah membawakan ke dalam kedudukan Rais 'Am NU kegigihan mempertahankan pluralitas partai politik, berhadapan dengan gagasan Bung Karno waktu itu, pluralitas yang ternyata masih tertahan dalam tahanan politik kita saat ini. Padahal ia adalah unsur utama bagi proses demokratisasi kita yang semakin matang dan penuh tantangan di masa depan. Kiai Bisri Syansuri membawakan dua hal yang sebenarnya saling berlawanan: keinginan membela hukum agama di hadapan proses modernisasi yang sering membentuk pembaratan/westernisasi sekuler. Kiai Bisri mampu mengembangkan fleksibilitas sikap terhadap proses tersebut, dengan tetap memelihara esensi hukum agama. Kiai Ali Maksum melanjutkan dialog antaragama dan proses modernisasi itu dengan memperdalam cakrawala filosofis para ulama NU. Hasilnya adalah rekonsiliasi positif antara Islam dan Pancasila, yang oleh Kiai Imron Rosyadi, SH dan almarhum KH. Dr. Tholhah Mansur dikonkretkan dalam bentuk rumusan "Pancasila adalah asas NU, sedangkan Islam adalah aqidahnya."

Komunitas misi yang dibawakan oleh empat orang pemimpin tertinggi NU di masa lampau itu dimantapkan oleh Kiai Achmad Shiddiq dengan sumbangan-sumbangannya yang telah diuraikan di atas. Masa depan NU tergantung pada kemampuan

In Memoriam: Kiai Achmad Shiddiq

Rais 'Am berikutnya untuk melanjutkannya dengan misi lebih konstruktif lagi dalam menghadapi era industri dan pasca-industri pada abad ke-21 nanti.



Gus Miek: Wajah Sebuah Kerinduan

Tiga tahun lalu, di sebuah beranda surau di Tambak Beras, Desa Ploso, Kediri, saya berhasil menelusuri Kota Kediri sebelum melihat mobil Gus Miek di sebuah gang, tengah meninggalkan tempat itu. Dalam kecepatan tinggi, mobilnya menuju ke arah Selatan dan hanya kami bayangi dari kejauhan. Setelah membelok ke Barat dan kemudian ke Utara melalui jalan paralel, akhirnya mobil itu berhenti di depan surau tersebut. Gus Miek sudah meninggalkan mobilnya menuju ke surau itu, ketika mobil tumpangan saya sampai. Ia terkejut melihat kedatangan saya, karena dikiranya saya adalah adiknya, Gus Huda. Rupanya, mobil tumpangan saya sama warna dan merek dengan mobil adiknya itu.

Dari beranda itu ia menunjuk sebidang tanah yang baru saja disambungkan ke pekarangan surau dan berkata kepada saya, “Di situ nanti Kiai Achmad akan dimakamkan. Demikian juga saya. Dan nantinya *smpeyan*.” Dikatakan, tanah itu sengaja dibelinya untuk tempat penguburan para penghafal al-Qur’an. Saya katakan kepadanya, bahwa saya bukan penghafal

al-Qur'an. Dijawabnya bahwa bagaimanapun saya harus dikuburkan di situ. Setahun kemudian, ketika KH. Achmad Shiddiq wafat, beliau pun dikuburkan di tempat itu atas permintaan Gus Miek. Baru saya sadari bahwa Kiai Achmad yang dimaksudkannya setahun sebelum itu adalah KH. Achmad Shiddiq.

Hal-hal seperti inilah yang sering kali dijadikan bukti oleh banyak orang, bahwa KH. Hamiem Jazuli alias Gus Miek adalah seorang dengan kemampuan supernatural. Sesuai dengan "tradisi" penyempitan makna istilah, orang awam menyebutnya dengan istilah wali (*sint*). Kemampuan supernatural KH. Hamiem alias Gus Miek itu, dalam istilah eskatologi orang pesantren, dinamakan *khoriqul 'adah*, alias keanehan-keanehan. Dengan bermacam-macam keanehan yang dimilikinya, Gus Miek lalu memperoleh status orang keramat. Banyak "kesaktian" ditempelkan pada reputasinya. Mau banyak rezeki, harus memperoleh berkahnya. Ingin naik pangkat, harus didukung olehnya. Mau beribadah haji, harus dimakelarnya. Mau gampang jodoh, minta pasangan kepadanya. Dan demikian seterusnya.

Reputasinya sebagai orang keramat ini, dinilai sebagai pendorong mengapa banyak orang berbondong-bondong memadati acara keagamaan yang dilangsungkan oleh Gus Miek. *Sana'an* (bersama-sama mendengarkan bacaan al-Qur'an oleh para penghafalnya) yang diselenggarakannya di mana-mana, selalu penuh sesak oleh rakyat banyak. Dari pagi orang ber-

sabar mendengarkan bacaan al-Qur'an, untuk mengamini do'a yang dibacakan Gus Miek seusai menamatkan bacaan al-Qur'an secara utuh, biasanya sekitar pukul 8 malam. Bersabar mereka menanti sepanjang hari untuk memperoleh siraman jiwa berupa *mau'izah hasanah* (petuah yang baik) dari tokoh kiai kharismatik ini. Padahal, sepagian itu ia masih tidur, setelah begadang semalam suntuk. Itulah acara rutinnnya, di mana pun ia berada.

Baru belakangan orang menyadari, bahwa Gus Miek menempuh dua pola kehidupan sekaligus. Kehidupan tradisional orang pesantren, tertuang dalam rutinitas *Sema'an*, dan gebyarnya kehidupan dunia hiburan modern. Gebyar, karena selamanya ia berada di tengah diskotik, *night club*, *coffee shop*, dan "arena persinggahan perkampungan" orang-orang tuna susila.

Tidak tanggung-tanggung, ia akrab dengan seluruh penghuni dan aktor kehidupan tempat tersebut. Yang ditenggaknya adalah bir hitam, yang setiap malam ia nikmati berbotol-botol. Rokoknya *Wisnilak* bungkus hitam, yang ramuannya diakui berat.

Kontradiktif? Ternyata tidak, karena di kedua tempat itu ia berperan sama. Memberi kesejukan kepada jiwa yang gersang, memberikan harapan kepada mereka yang putus asa, menghibur mereka yang bersedih, menyantuni mereka yang lemah, dan mengajak semua pada kebaikan. Apakah itu petuah

di pengajian seusai *Sema'an*, sewaktu konsultasi pribadi dengan pejabat dan kaum elite lainnya, ataupun ketika meladeni bisikan kepedihan yang disampaikan dengan suara lirih ke telinganya oleh perempuan-perempuan penghibur, esensinya tetap sama. Manusia mempunyai potensi untuk memperbaiki keadaannya sendiri.

* * *

Dua tahun yang lalu, Gus Miek mengatakan kepada saya, bahwa saya harus mundur dari NU. Saya baca hal itu sebagai himbauan agar saya teruskan perjuangan menegakkan demokrasi di negeri kita, tetapi dengan tidak “merugikan” kepentingan organisasi yang saat ini sedang saya pimpin. Dikatakan, sebaiknya saya mengikuti jejaknya berkiprah secara individual melayani semua lapisan masyarakat. Saya tolak ajakan itu dua tahun yang lalu, karena saya beranggapan perjuangan melalui NU masih tetap aktif.

Baru sekarang saya sadari, menjelang saat kepulangan Gus Miek ke haribaan Tuhan, bahwa ia membaca tanda zaman lebih jeli daripada saya. Bahwa dengan “menggendong” beban NU, upaya menegakkan demokrasi menjadi tidak semakin mudah. Karena para pemimpin NU yang lain justru tidak ingin kemapanan yang ada diusik orang. Dari tokoh inilah saya belajar untuk membedakan apa yang menjadi pokok persoalan dan apa yang sekadar ranting.

Tetapi, Gus Miek juga hanyalah manusia biasa. Manusia yang memiliki kekuatan dan kelemahan,

kelebihan dan kekurangan. Keseimbangan hidupnya tidak bertahan lama oleh ketimpangan pendekatan yang diambilnya. Ia menjadi terlalu memperhatikan kepentingan orang-orang besar dan para pemimpin tingkat nasional. Ia juga tidak menjadi imun terhadap kenikmatan dunia yang gebyar. Untuk beberapa bulan hubungan saya dengan Gus Miek secara batin menjadi sangat terganggu karena hal-hal itu. Saya menolak untuk mendukung jagonya untuk jabatan wapres, dan ini membuat ia tidak enak perasaan kepada saya.

Mungkin tidak dipahaminya keinginan saya agar agama tidak dimanipulasikan dengan politik negara. Tugas pemimpin agama adalah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara dan berupaya agar kebenaran dapat ditegakkan. Sedang kebenaran itu akan terjelma melalui kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, kedaulatan hukum, kebebasan, dan persamaan perlakuan di muka undang-undang.

Tetapi, sejauh apapun hubungan kami berdua, saya sendiri tetap rindu kepada Gus Miek. Bukan karena gebyarnya dunia hiburan, melainkan bahwa kalau malam, menjelang pagi, ia tidur beralaskan kertas koran di rumah Pak Syafi'i Ampel di Kota Surabaya, atau Pak Hamid di Kediri. Yang dimiliki Pak Hamid hanyalah sebuah kursi plastik jebol dan dua buah gelas serta teko logam. Itulah dunia Gus Miek yang sebenarnya, yang ditinggalkannya untuk beberapa bulan mungkin hanya sebagai sebuah kelengkapan lakonnya yang panjang. Agar ia tetap masih menjadi manusia, bukan malaikat.

Yang selalu saya kenang adalah kerinduannya pada upaya perbaikan dalam diri manusia. Karena itu, ulama idolanya pun adalah yang membunyikan lonceng harapan dan genta kebaikan, bukan hardikan dan kemarahan terhadap hal-hal yang buruk. Tiap 40 hari sekali ia mengaji di makam Kiai Ihsan Jampes, yang terletak di Tepi Brantas di Dukuh Mutih, pinggiran Kota Kediri. Ia gandrung kepada Mbah Mesir yang dimakamkan di Trenggalek, pembaca tarekat Syadziliah dua ratus tahun yang lalu ke Jawa Timur. Tarekat itu adalah tarekatnya orang kecil, dan membimbing rakyat awam yang penuh kehausan rasa kasih dan sapaan yang santun.

Gus Miek inilah yang melalui transendensi keimanannya tidak lagi melihat “kesalahan” keyakinan orang beragama atau berkepercayaan lain. Ayu Wedayanti yang Hindu diperlakukan sama dengan Neno Warisman yang muslimah, karena ia yakin kebaikan sama berada pada dua orang penyanyi tersebut. Banyak orang Katolik menjadi pendengar setia wejangan Gus Miek seusai *Sema'an*.

Kerinduannya pada realisasi potensi kebaikan pada diri manusia inilah yang menurut saya supernatural. Bukan karena ia menyalahi ketentuan hukum-hukum alam. Super karena ia mampu mengatasi segala macam jurang pemisah dan tembok penyekat di antara sesama manusia. Natural karena yang ia harapkan hanyalah kebaikan bagi diri manusia. Kalau ia dianggap ~~nyentrik~~ (*khoriqul 'adah*), maka dalam artian

inilah ia harus dipahami demikian. Bukankah ~~nyendah~~ orang yang tidak peduli batasan agama, etnis, dan profesi serta tidak hirau apa yang dinamakan baik dan buruk di mata kebanyakan manusia, sementara manusia saling menghancurkan dan membunuh?



Tuan Guru Faisal, Potret Kepribadian NU

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat dua figur ulama besar yang sangat menonjol dan berpengaruh, yaitu Tuan Guru Zainuddin (Pemimpin Nahdlatul Wathan) dan Tuan Guru Faisal (Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama).

Tuan Guru Faisal (70) baru saja meninggalkan kita 3 Februari lalu di Lombok. Saya ingin mengenangnya berkenaan dengan pribadinya yang sangat menarik. Tuan Guru untuk menunjukkan rasa cinta pada organisasi, ternyata menempuh jalan yang berliku-liku.

Di NU, Tuan Guru Faisal adalah generasi kedua NU di NTB. Pusat NU NTB adalah di Lombok. Pengembangan NU di sana dengan dua sistem, yakni keguruan dan pengajian. Dari aspek historis, yang membawa NU ke Lombok adalah seorang ulama keturunan Arab, Syaikh Abdul Manan. Itu terjadi pada tahun 1930-an. Syaikh Abdul Manan diutus oleh Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari Rais Akbar NU untuk membuka wilayah NU Lombok. Waktu itu diistilahkan konsul NU Lombok, karena belum ada

propinsi. Otomatis Syaikh Abdul Manan menjadi pimpinan pertama NU di Lombok.

Setelah Syaikh Abdul Manan meninggal, kepemimpinan NU dipegang oleh Tuan Guru Zainuddin (yang kini pimpinan Nahdlatul Wathan itu) dan Tuan Guru Faisal sebagai orang kedua. Waktu itu NU masih ada di dalam Partai Masyumi. Maka kedua ulama itu, otomatis selain memimpin NU, juga memimpin Masyumi.

Ketika NU keluar dari Masyumi tahun 1952, kedua Tuan Guru ini bersepakat membagi-bagi tugas. Tuan Guru Zainuddin meminta kepada muridnya, Tuan Guru Faisal tetap dalam NU untuk menggantikan posisinya. Sedangkan Tuan Guru Zainuddin sendiri berkonsentrasi di Masyumi. Langkah dan strategi ini diambil seiring dengan konstelasi politik zaman liberal itu. Tujuannya, agar Masyumi dapat merebut kedudukan bupati-bupati dan mempertahankannya, sehingga PNI yang merupakan pesaing politiknya tak berdaya mengambil kursi pemerintahan di tingkat kabupaten di wilayah NTB. Tentu, langkah itu, untuk kepentingan umat. Inilah kerja sama yang sangat baik antara Masyumi dan NU.

Ternyata, pada Pemilu Pertama 1955, di Lombok Masyumi dan NU berimbang. Dengan demikian, lalu terdapat dua entitas politik yang dipimpin oleh guru dan murid. Entitas politik Masyumi yang dipimpin Tuan Guru Zainuddin dan entitas politik NU yang dipimpin oleh Tuan Guru Faisal—yang *notabene* adalah

murid Tuan Guru Zainuddin itu. Dari sini mulai terjadi perbedaan institusional di antara mereka—meskipun tentu hubungan guru dan murid tetap berjalan dengan baik.

Ketika Orde Baru, Tuan Guru Zainuddin masuk dalam lingkungan Golkar untuk merebut kepemimpinan politik di daerahnya waktu itu. Sementara Tuan Guru Faisal tetap di NU yang waktu itu masih berstatus partai politik. Pada kampanye Pemilu 1971, ketika parpol pada umumnya, termasuk NU, terlibat dalam pola hubungan yang kurang pas dengan Golkar, maka hubungan guru-murid itu menjadi renggang. Tetapi, demi membela NU yang dicintainya, Tuan Guru Faisal rela meniti kerenggangan hubungan tersebut. Padahal urusan hubungan guru-murid itu dalam lingkungan pesantren dan NU sangat dijaga, dan semaksimal mungkin diupayakan janganlah sampai terjadi kerenggangan. Di sinilah Tuan Guru Faisal mengorbankan kepentingan pribadinya untuk *jam'iyah* yang sangat dicintai.

Sewaktu NU kemudian bergabung dalam PPP, Tuan Guru Zainuddin masih tetap di Golkar. Sementara Tuan Guru Faisal mengikuti jejak NU masuk dalam PPP. Begitu pun ketika tahun 1983 NU keluar dari PPP dan kembali ke khittah 1926, Tuan Guru Faisal juga keluar dari politik dan kembali ke khittah.

Anehnya, dalam kondisi dan situasi seperti itu, di mana Tuan Guru Faisal memilih kembali ke khittah dan keluar dari PPP, Tuan Guru Zainuddin justru

menyeberang ke PPP dalam Pemilu 1987 dan 1992. Jadi, ada semacam peristiwa metamorfose dalam pandangan Tuan Guru Zainuddin.

Kendati demikian, kedua ulama ini juga tidak bisa bertemu. Karena, Tuan Guru Faisal tunduk dan cinta kepada NU-nya yang kala itu sudah kembali ke khittah—walaupun ia sendiri tetap bersimpati pada PPP, tetapi tidak bisa ikut langsung terlibat gelanggang. Sementara Tuan Guru Zainuddin langsung ikut aktif kampanye untuk partai berlambang bintang itu.

Jelasnya, kedua Tuan Guru itu tidak bisa berdekatan kembali, karena memang secara institusional mereka tetap berseberangan. Perbedaan itu semakin terasa, ketika Tuan Guru Faisal tetap berada dalam NU, sedangkan Tuan Guru Zainuddin tetap berada di Masyumi, kemudian Golkar dan memimpin organisasi yang didirikannya yang bernama Nahdathul Wathan (NW). Dua nahdlat ini pun tidak bisa bertemu juga sampai sekarang ini.

Namun, keduanya sama-sama menjadi besar dan sama-sama dicintai rakyat. Kalau misalnya ada semacam pembagian, maka Tuan Guru Faisal berpengaruh luas di masyarakat Lombok Barat, Tuan Guru Zainuddin berpengaruh sangat luas di Lombok Timur. Namun, bila dilihat dari keseluruhan, maka pengaruh Tuan Guru Faisal lebih besar karena beliau memimpin NU di Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk di dalamnya Pulau Sumbawa.

* * *

Dalam konteks ini, saya ingin merekam sosok kepribadian ulama semacam Tuan Guru Faisal. Beliau adalah sosok kepribadian yang memiliki pandangan yang konsisten, yaitu kecintaannya terhadap NU yang tidak habis-habisnya.

Namun, dalam hal pandangannya mengenai siapa yang dipilih untuk didukung, saya sendiri dengan Tuan Guru Faisal berbeda. Saya tidak mau memilih apa pun atau siapa pun, atau memberikan dukungan secara transparan dan terbuka. Itu urusan saya yang asasi. Tidak harus mengajak orang lain dan tidak akan memberitahukan kepada orang lain; mana yang saya pilih dan mana yang tidak. Sementara Tuan Guru Faisal selalu menunjukkan dukungannya kepada PPP secara terbuka.

Di sini pula ada perbedaan pandangan atau penafsiran antara ia dan saya mengenai arti khittah 1926. Kalau saya menganggap khittah NU itu tidak terkait secara organisatoris dengan kekuatan sosial politik mana pun, maka artinya kita tidak boleh membantu mereka. Tuan Guru Faisal tidak demikian. Beliau hanya membatasi pada penafsiran bahwa yang tidak boleh itu adalah merangkap kepengurusan. Bila hanya menunjukkan simpati, kata Tuan Guru Faisal, itu boleh-boleh saja. Beliau berargumentasi bahwa dalam kenyataannya banyak pimpinan NU yang menunjukkan keberpihakan mereka kepada Golkar. Tetapi, dalam pandangan saya menunjukkan simpati itu pun menyalahi khittah, sama saja apakah ke PPP, ke Golkar, atau ke PDI.

Perbedaan pandangan semacam ini sebetulnya tidak mendasar. Namun, cukup membuat sungkan satu sama lain. Saya sendiri tidak mengerti jalan pikirannya. Ia juga rasanya tidak menerima dengan jalan pikiran saya. Tetapi, karena ia mencintai NU, maka beliau pun mencintai apa yang ingin saya lakukan untuk kepentingan NU.

Pada Mukhtar Situbondo 1984, perdebatan mengenai khittah antara saya dan Tuan Guru Faisal tidak bisa dielakkan. Perdebatan-perdebatan berlangsung hingga pagi, namun perbedaan pandangan di antara kami tetap saja tidak bisa dipertemukan.

Meskipun dalam alam pikiran yang berbeda, Tuan Guru Faisal dan saya tetap ingin mewujudkan keinginan bersama, yakni mencintai dan mengabdikan cita-cita NU. Karena itu, walaupun dalam suasana perbedaan pandangan pribadi—sebelum wafat, beliau pernah mengatakan kepada keluarganya kalau dirinya meninggal, maka orang yang pertama harus dihubungi dan diberitahu di Jakarta adalah Abdurrahman Wahid. Bukan PBNU-nya.

Saya merasa kehilangan Tuan Guru Faisal secara pribadi. Saya secara pribadi melihat, tokoh yang satu ini memiliki karakter yang sangat mengasyikkan. Beliau mempunyai sikap yang konsisten dan menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap NU sampai wafatnya.

Bagi orang yang belum mengenal NU, sikap Tuan Guru Faisal adalah contoh yang sangat berbicara tentang sikap saling menghormati di antara orang yang berbeda pandangan, sekalipun di tubuh NU. Tuan Guru Faisal adalah contoh dan potret dari kepribadian NU sejati, yang sangat mengutamakan persaudaraan.

Persaudaraan adalah salah satu basis penting di mana NU hadir dan berdiri. Atas dasar persaudaraanlah NU memiliki trilogi hubungan: *Ukhuwwah Islamiyah* (hubungan persaudaraan antarumat Islam), *Ukhuwwah Basariyah/Insaniyah* (hubungan persaudaraan antarumat manusia), dan *Ukhuwwah Wathaniyah* (hubungan persaudaraan antarnegara dan bangsa).

Trilogi persaudaraan itu merupakan bagian penting dari kepribadian jama'ah (warga) NU, dulu, kini, dan di masa datang, di saat NU diterpa badai apapun tidak. Jika terjadi perbedaan pandangan di antara warga NU, sejak dini salah seorang pendiri NU, KH. Wahab Chasbullah, telah memberikan solusi dengan pedoman: "Bersepakat untuk tidak sepakat. Berbeda tetapi tetap bersaudara." Dan Tuan Guru Faisal telah menjadi saksi yang patut diteladani mengenai semangat persaudaraan tersebut.



Sumber Tulisan

TEMPO. Pesantren dan Ludruk (22 Desember 1979).
Kiai Nyentrik Membela Pemerintah (5 April 1980). Kiai Chasbullah dan Musuhnya (7 Juni 1980). Kiai Ikhlash dan Ko-Edukasi (19 Juli 1980). Rasionalitas Kiai Adlan (26 Juli 1980). Kiai Razaq yang Terbakar (20 September 1980). Ketat Tetapi Longgar (27 September 1980). Kiai Iskandar dan Pak Damin (4 Oktober 1980). Bersatu dalam Menuntut Ilmu (11 Oktober 1980). Baik Belum Tentu Bermanfaat (1 November 1980). Sang Kiai dan Keyakinannya (?). Dunia Nyata Kiai Zainal (7 Maret 1981). Ustadz yang Hidup dalam Dua Dunia (18 April 1981). Bila Kiai Berdebat (16 Mei 1981). Kiai Dollar Berdakwah (27 Juni 1981). Syaikh Mas'ud Memburu Kitab (18 September 1982). Kiai Pencari Mutiara (16 Oktober 1982). Yang Umum dan Yang Khusus (30 April 1983). Skala Prioritas Ibadah (24 Desember 1983). Dokter Idealis Kiai Formalis (28 April 1984). Mu'allim Syafi'i (5 September 1985).

Kiai Nyentrik Membela Pemerintah

KOMPAS. In Memoriam: Kiai Achmad Shiddiq (26 Januari 1991). Gus Miek: Wajah Sebuah Kerinduan (13 Juni 1993). Tuan Guru Faisal, Potret Kepribadian NU (23 Februari 1996).



Esei-esei "antropologi Kiai"
ini bertutur tentang
'rasionalitas' yang penuh
warna, yang bergerak antara
ortodoksi-nan-ketat dan
'penyiasatan pragmatik' agar
kehidupan tetap berlangsung.
Kearifan?
Atau 'pengkhianatan'?

LKiS